

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional diperlukan investasi dalam jumlah yang besar, yang pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap. Dengan demikian arah kebijaksanaan utama di bidang pembiayaan pembangunan adalah menggali dan mengembangkan secara maksimal sumber dana dalam negeri (Repelita V, 1989/1990-1993/1994). Dengan ketentuan tersebut, diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk menggerakkan dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor barang dan jasa.

Di samping itu juga dikemukakan bahwa pengerahan dana tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan khususnya lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal perlu makin ditingkatkan, seperti pengerahan dana dalam bentuk deposito, penerbitan surat-surat berharga, tabungan dan sebagainya sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan semakin meningkat.

Kalau diperhatikan, perkembangan jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat selama ini, dari tahun ke tahun tampaknya mengalami peningkatan khususnya penghimpun

punan dana melalui perbankan. Hal ini ditunjukkan oleh naiknya jumlah deposito dan tabungan yang berhasil dihimpun. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1 : Perkembangan Posisi Tabungan dan Deposito Berjangka di Indonesia tahun 1983-1989 (dalam milyar Rp.).

Tahun	Tabungan	Deposito
1983	584	4.441
1984	754	6.022
1985	1.020	8.888
1986	1.387	10.525
1987	1.627	15.366
1988	2.174	19.732
1989	2.802	23.078

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, 1990.

Dari tabel di atas tampak bahwa deposito mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dari Rp. 4.441 milyar pada akhir tahun 1983 menjadi Rp. 23.078 milyar pada akhir tahun 1989, atau rata-rata pertumbuhan 35% per tahun. Sementara dalam periode yang sama jumlah tabungan juga mengalami kenaikan dari Rp. 584 milyar pada tahun 1983 menjadi Rp. 2.802 milyar pada akhir tahun 1989 atau dengan rata-rata pertumbuhan 30.3% per tahun.

Agar pembiayaan pembangunan tetap berada dalam jalur yang telah digariskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, di mana sumber dana bantuan luar negeri tetap ber-

peranan hanya sebagai pelengkap, maka pemupukan dana dari dalam negeri, termasuk daerah-daerah perlu selalu dilakukakan dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

Bali merupakan salah satu daerah di Indonesia yang saat ini juga memerlukan dana untuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, seperti sektor pariwisata yang sedang berkembang, sektor perdagangan, sektor industri kecil dan sektor-sektor informal.

Dana masyarakat di daerah ini dihimpun melalui bank-bank pemerintah, bank-bank swasta umum dan bank-bank perkreditan rakyat. Jumlah dana yang berhasil dihimpun melalui sektor perbankan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh tabel 1.2.

Tabel 1.2 : Perkembangan Posisi Tabungan dan Deposito Berjangka di Propinsi Bali tahun 1984-1989 (dalam jutaan Rp.)

Tahun	Tabungan	Deposito
1984	24.518	33.246
1985	33.828	54.647
1986	47.716	69.091
1987	54.937	102.118
1988	70.029	155.387
1989	141.600	322.040

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia Cabang Denpasar, 1990.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan deposito cukup besar yaitu rata-rata sebesar 47,5% per tahun, sementara rata-rata pertumbuhan jumlah tabungan sebesar 30,3% per tahun.

Selain menghimpun dana masyarakat, bank berfungsi pula menyalurkan dana tersebut ke berbagai sektor untuk kepentingan pembangunan. Jumlah dana yang telah disalurkan ke berbagai sektor ekonomi di Propinsi Bali ditunjukkan oleh tabel 1.3.

Seperti diketahui bahwa bank-bank umum di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta, belum menjangkau lapisan masyarakat kecil yang hidup baik di daerah pedesaan maupun di kota-kota. Karena itu diusahakan pendirian bank untuk melayani kebutuhan para petani, peternak, pedagang dan pengusaha kecil serta pegawai dan pensiunan. Hal ini penting untuk mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan, seperti yang disebutkan dalam delapan jalur pemerataan. Bank yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melayani masyarakat ini adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Propinsi Bali tidak saja dikenal sebagai daerah pariwisata yang cukup besar di Indonesia, tetapi juga populer dengan bank perkreditan rakyat terutama bank pasarnya yang berkembang cukup pesat di seluruh pelosok desa. Jumlah bank perkreditan rakyat yang beroperasi di Bali sampai akhir tahun 1989 adalah 46 unit, yang terdiri dari 12

Tabel 1.3 : Posisi Pinjaman Perbankan Menurut Sektor Ekonomi di Propinsi Bali tahun 1984-1989. (dalam jutaan Rp).

Tahun Sektor	1984	1985	1986	1987	1988	1989
Pertanian	17.118	15.326	15.805	18.476	27.560	45.805
Pertambangan	200	-	2	42	-	291
Perindustri- n	30.509	39.652	40.963	46.609	60.378	88.210
istriki, air an gas	-	83	442	523	370	471
onstruksi	12.835	12.310	11.816	13.208	18.180	26.350
erdagangan an restoran	69.081	83.576	108.208	155.686	207.018	328.314
engangkutan an pergudang n	5.008	3.995	3.323	5.810	8.279	16.326
asa-jasa unia usaha	3.092	3.736	5.623	8.417	17.478	19.710
asa-jasa osial masya- akat	11.956	11.463	13.264	8.828	16.673	26.902
ain-lain	28.434	39.726	50.276	68.068	73.322	130.638
Jumlah	178.303	209.867	249.722	325.667	429.258	682.735

Sumber : Laporan Bank Indonesia Cabang Denpasar, 1990.

unit Bank Desa dan 34 unit Bank Pasar. Jumlah ini tersebar di delapan kabupaten (Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Jembrana dan Tabanan) dan jumlah terbanyak terdapat di kabupaten Badung yang terpusat di kota Denpasar.

Bila dilihat dari jumlah bank komersial yang beroperasi di Bali pada tahun 1989, yang terdiri dari 93 unit bank pemerintah (termasuk 63 BRI unit desa) serta 47 unit bank umum swasta nasional, maka 46 unit bank perkreditan rakyat ini mempunyai peranan yang cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah dana yang dapat dikumpulkan dan dana yang disalurkan sampai akhir tahun 1989 (lihat tabel - 1.4.).

Tabel 1.4. : Peranan Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Bali tahun 1984-1989 (dalam jutaan Rp)

Tahun	Tabungan	Deposito	Pinjaman
1984	11,052	16.886	24.782
1985	15.443	27.117	35.864
1986	24.186	42.042	58.939
1987	32.583	53.943	82.151
1988	45.143	73.132	112.207
1989	57.306	100.5411	139.971

Sumber : Laporan Bank Indonesia Cabang Denpasar, 1990.

Dari jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan oleh Bank Perkreditan Rakyat dibandingkan dengan jumlah keseluruhan dana yang dihimpun dan disalurkan bank-bank di Bali maka porsi tabungan yang dihimpun Bank Perkreditan Rakyat sebesar 49%, sedangkan deposito sebesar 34%. Sementara itu dari jumlah dana yang disalurkan di Bali, peranan Bank Perkreditan Rakyat sebesar 22%.

Kebijaksanaan dalam pengumpulan dan penyaluran dana dari suatu bank, seharusnya diarahkan agar disatu pihak dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal, sedangkan dipihak lain juga harus mampu menjaga kelancaran operasinya dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Kunci keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai "finansial intermediary" berjalan dengan baik. Jadi bank hendaknya dapat melayani dengan sebaik-baiknya mereka yang kelebihan uang dan menyimpannya dalam bentuk deposito maupun tabungan, serta melayani kebutuhan mereka melalui pemberian kredit.

Saat ini Bank Perkreditan Rakyat di Bali menyalurkan dana ke sektor-sektor : pertanian, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa serta kepada perorangan/pegawai. Dana yang disalurkan tersebut dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Dalam pengumpulan dana tabungan, bank mengumpulkannya dari rumah ke rumah, kantor-kantor dan lokasi perusahaan kecil.

Dari sudut pengaliran dana kegiatan ini cukup efektif, tetapi dari sudut biaya kegiatan ini merupakan beban biaya yang relatif tinggi. Pengumpulan dana melalui deposito berjangka sering melebihi masa jatuh tempo yang diizinkan oleh bank pengawas yaitu tidak melebihi jangka waktu 3 bulan, hal ini karena untuk memperoleh deposito dengan jangka waktu 3 bulan relatif sulit.

Sementara itu bank menyalurkan dana mahal tersebut ke berbagai sektor yang mempunyai hasil maupun resiko yang berbeda. Sedangkan dana yang tidak disalurkan dalam bentuk kredit ditempatkan pada bank lain dalam bentuk deposito.

Oleh karena itu, untuk dapat mencapai tujuan bank yaitu tingkat keuntungan yang maksimum, manajemen bank hendaknya dapat mengelola dana-dana yang ada dan kemudian menyalurkannya secara optimal.

1.2. Perumusan Masalah

Bagi sebuah bank tidaklah cukup hanya memberikan suatu jenis jasa keuangan tertentu, cara dan mutu pemberian jasa adalah penting. Di atas segalanya bank haruslah beroperasi secara sehat, sehingga kepentingan semua pihak terjaga dan kelanjutan hidup bank terjamin. Hal ini hanya dapat dicapai dengan kebijaksanaan dan praktek-praktek yang berpandangan ke depan. Jadi perencanaan jangka menengah dan panjang memegang peranan penting bagi manajemen bank. Keuntungan jangka pendek mungkin bisa menjadi tidak mengun-

tungkan dan malahan membahayakan kesehatan bank dalam jangka yang lebih panjang. Misalnya bank menyalurkan dana se-maksimal mungkin tanpa memperhatikan kepentingan likuiditas, akan mengakibatkan berkurangnya kepercayaan nasabah terhadap bank yang bersangkutan.

Salah satu keunikan perbankan dan yang paling banyak meminta keterampilan manajemen adalah penyaluran simpanan nasabah sedemikian rupa sehingga nasabah dapat menariknya pada waktu tertentu atau pada waktu diperlukan. Jika simpanan itu ditahan dalam bentuk uang tunai, bank memang siap sedia, tetapi tidak memberikan penghasilan yang dipakai untuk menutup biaya modal.

Oleh karena bank menghimpun dana dari masyarakat maka bank juga berkewajiban menyediakan dana ini dengan cara - cara yang paling baik dalam melayani kepentingan masyarakat di samping kepentingan pemilik modal. Di sini dibutuhkan objektivitas dan kebijaksanaan untuk menyalurkan dana - dana yang dapat dipinjamkan secara adil, sehat dan menguntungkan. Memberikan kredit mungkin mengandung resiko keamanan dan resiko likuiditas. Tetapi bila hanya memberikan kepada pemohon yang paling kuat saja akan mematikan pertumbuhan masyarakat yang lebih lemah.

Dengan demikian manajemen harus berusaha untuk menyeimbangkan antara unsur likuiditas dan usaha bank dalam mencapai profitabilitas. Dengan kata lain bank harus dapat menyalurkan dananya secara optimal.

Optimal dalam hubungan ini adalah pengalokasian dana yang tersedia sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal, baik yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan kredit maupun penempatan pada bank lain.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah : apakah kebijaksanaan penyaluran dana yang diterapkan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Bali sudah optimal ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Salah satu keputusan manajerial bank yang penting adalah menyalurkan sumber-sumber yang ada seefisien mungkin sehingga diperoleh hasil yang maksimal.

Dalam Bank Perkreditan Rakyat, dana yang tersedia akan disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor-sektor ekonomi yang mempunyai hasil maupun resiko yang berbeda, sementara dana yang tidak disalurkan ditempatkan pada bank lain. Untuk itu penyalurannya diusahakan seoptimal mungkin.

Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui apakah kebijaksanaan penyaluran dana pada Bank Perkreditan Rakyat di Bali sudah optimal.

Dengan diketahuinya optimasi penyaluran dana, manajemen bank dapat lebih mudah melakukan analisis dan mempercepat pengambilan keputusan.

1.4. Lingkup Penelitian

Penelitian mengenai Kebijakan Penyaluran Dana Pada Bank Perkreditan Rakyat di Bali yang penulis lakukan ini, hanya terbatas pada bank perkreditan rakyat gaya lama yaitu bank perkreditan rakyat yang telah ada sebelum dikeluarkannya paket kebijaksanaan tanggal 27 Oktober, tahun 1988 (Pakto 27) serta dapat bekerja seperti dan ditempatnya semula, tetapi tidak diperkenankan pindah ke luar wilayah kecamatan tempat kedudukannya. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa belum tersedianya data sebagai dasar analisis untuk bank perkreditan rakyat gaya baru, karena bank jenis ini baru ada setelah Pakto 27 dan di daerah Bali mulai berkembang pada tahun 1990.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dengan diketahuinya proporsi penyaluran dana yang optimal, dapat digunakan sebagai acuan oleh para pengambil keputusan dalam bidang perbankan khususnya bank perkreditan rakyat dalam merencanakan portfolio kredit, agar memperoleh keuntungan yang maksimal serta dapat menjamin kelancaran operasi bank.

Bila ditinjau dari khasanah keilmuan, kebijaksanaan penyaluran dana yang optimal dengan menggunakan teknik linear programming dapat menambah referensi dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen sebagai salah satu usaha untuk memahami optimasi penyaluran dana.



Bagi pemerintah, khususnya Bank Indonesia merupakan bahan masukan yang bermanfaat baik dalam merumuskan peraturan perundangan dan kebijaksanaan pengembangan bank maupun dalam hubungan dengan usaha pembinaan bank-bank yang ada.

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan kerjasama antara pihak lembaga pendidikan tinggi dengan pihak dunia usaha, khususnya perbankan dalam hal tukar-menukar informasi ilmiah maupun evaluasi terhadap aplikasi teori manajemen perusahaan dilingkungan perbankan bisa ditingkatkan secara berkelanjutan di masa mendatang.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan mengikuti sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menyajikan tentang latar belakang masalah yang mengemukakan alur berfikir penulis, sehingga memilih judul penelitian ini, kemudian mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, lingkup penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam tinjauan pustaka, pertama akan dikemukakan beberapa penelitian empiris tentang bank perkreditan rakyat yang pernah dilakukan; selanjutnya akan

disajikan mengenai teori-teori perbankan yang mendasari penelitian ini yaitu tentang pengertian Bank Perkreditan Rakyat, Sumber-sumber dana bank, Pengalokasian dana bank dan manajemen portfolio aktiva bank. Bagian terakhir dari bab ini dikemukakan hipotesis penelitian.

BAB. III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan tentang metodologi yang digunakan, meliputi identifikasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, penentuan sampel dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang keadaan umum BPR di Bali, struktur organisasinya dan gambaran BPR sampel secara singkat.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini menyajikan mengenai kebijaksanaan penyaluran dana yang telah dilakukan, optimasi penyaluran dana serta pengujian hipotesis yang merupakan perbandingan antara laba aktual dengan laba yang diperoleh jika dihitung dengan pendekatan "linear programming".

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan atas hasil penelitian maka dalam bab ini ditarik kesimpulan dan diajukan beberapa saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam tinjauan pustaka ini dikemukakan mengenai beberapa hasil penelitian empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat dan tinjauan teoritis yang melandasi penelitian ini.

2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejauh ini ada beberapa penelitian tentang Bank Perkreditan Rakyat yang pernah dilakukan di Indonesia dan di Bali.

Gatha, meneliti mengenai "Masalah dan Prospek Bank Pasar di Bali". Penelitian ini dilakukan terhadap 50 unit Bank Pasar yang tersebar di delapan kabupaten di Bali. Penelitian tersebut bermaksud untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh bank-bank itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun assetnya bervariasi tetapi masalah yang dihadapi dan prospek masa depannya menunjukkan tanda-tanda keseragaman. Masalah-masalah tersebut diantaranya : masalah perlindungan hukum, pendanaan, perkreditan dan manajemen. UU No.14 tahun 1967 dan seperangkat peraturan-peraturan yang melengkapi UU tersebut saat ini dirasakan sebagai beban yang seringkali menghambat kegiatan operasional karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat Bali. Diantara peraturan-peraturan tersebut adalah larangan melaksanakan giro.

menerima deposito dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan dan mendirikan pos kerja sebagai sarana pembantu. Sedangkan dana yang disalurkan Bank Perkreditan Rakyat tergolong dana mahal, karena untuk menarik tabungan ditempuh cara dengan memberikan hadiah, menambah biaya tenaga kerja dan transportasi. Dalam masalah kredit, harga yang ditawarkan relatif tinggi sehingga kalah bersaing dengan bank umum.

Untuk mempertahankan eksistensinya, bank berusaha menyesuaikan kegiatannya dengan melakukan terobosan-terobosan, diantaranya dengan menerima deposito dengan jangka waktu lebih dari 3 bulan dan menerima permohonan kredit dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Dari usaha-usaha tersebut telah memberikan hasil yang memadai yaitu perkembangan dana rata-rata 40% per tahun, pinjaman 44% dan asset 47% per tahun. Sedangkan prospek usaha yang menjadi tumpuan kegiatannya adalah dari sektor pariwisata, sektor industri kecil dan sektor-sektor informal (Gatha, 1985).

Rastini et al. (1989), meneliti tentang "Efisiensi Pendayagunaan Dana Masyarakat Pada Bank Perkreditan Rakyat di Daerah Bali". Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metoda empiris dengan mengambil kasus pada 26 bank yang berlokasi di 2 (dua) kabupaten di Propinsi Bali yaitu Badung dan Tabanan. Dalam penelitian ini dibahas beberapa aspek yang terkait dengan efisiensi pendayagunaan dana masyarakat yang meliputi aspek peranan bank meningkatkan la-

ju pertumbuhan ekonomi masyarakat, keberhasilan pengembangan usahanya, pengembangan orientasi strategi bisnis dan efektivitas pengelolaan usahanya. Pembahasan ini dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian antara lain mengukur hubungan peranan bank meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan keberhasilannya dalam mengembangkan usaha, pengembangan orientasi strategi bisnis serta pengaruh efektivitas pengelolaan usahanya terhadap keberhasilan dalam mengembangkan usaha.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis chi kuadrat, regresi berganda dan analisis multivariate yaitu dengan analisis faktor.

Marjanto Danoesapoetro et al.(1989), meneliti tentang "Peranan dan Prospek Bank Perkreditan Rakyat dalam rangka Kebijaksanaan Pakto". Dengan meneliti perkembangan jumlah Bank Perkreditan Rakyat, perkembangan dana yang di himpun dan perkembangan pinjaman yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa kebijaksanaan Pakto mempermudah prosedur pembentukan bank sampai tingkat kecamatan, sehingga lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan perkreditan bertambah banyak dan kebutuhan masyarakat pedesaan akan modal dapat lebih mudah dipenuhi. Mengingat bank-bank berorientasi pada pencarian keuntungan, maka penyebarannya diperkirakan tidak akan merata sebab orang akan membuka bank di tempat-tempat yang mempunyai potensi ekonomi yang besar, seperti

Jawa dan Bali, khususnya di pinggiran kota-kota besar. Ditinjau dari segi penyebaran, Bank Perkreditan Rakyat belum sepenuhnya menjangkau pedesaan secara keseluruhan dan penambahan di kota-kota hanya berupa BRI unit kota. Sementara itu ditinjau dari segi pengumpulan dana dan penyaluran dana melalui kredit, peranan bank masih kecil sekali dibandingkan dengan kelompok-kelompok bank lain, yaitu sebesar 3,4% dan inipun sebagian bank menyalurkan pinjaman kepada golongan menengah ke atas, sehingga bila dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada golongan ekonomi lemah tentunya lebih kecil dari jumlah tersebut.

Berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dikemukakan di atas, yaitu penelitian yang menyangkut permasalahan bank perkreditan rakyat secara umum sehubungan adanya peraturan-peraturan yang membatasi ruang geraknya ; dalam penelitian ini akan dikaji tentang kebijaksanaan yang dilakukan bank perkreditan rakyat dalam penyaluran dananya dengan menggunakan suatu pendekatan linear programming. Dengan demikian apabila pendekatan ini dikembangkan akan dapat menentukan optimasi penyaluran dana pada suatu bank.

2.2. Tinjauan Teoritis

Dalam tinjauan teoritis dikemukakan secara umum mengenai teori-teori yang terkait dengan judul penelitian, meliputi tentang Bank Perkreditan Rakyat, sumber-sumber dana bank, alokasi dana-dana bank dan manajemen portfolio asset.

2.2.1. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967, yang dimaksud dengan bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat kembali, terutama dalam bentuk kredit. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya yang dipersamakan dengan itu (Bank Indonesia : Paket Kebijakan Keuangan dan Perbankan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat, 1988 : 6).

Kegiatan usaha BPR disamakan dengan kegiatan bank komersial (Anwar Nasution, 1990 : 74) dan diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan atau pelayanan perbankan kepada lapisan masyarakat terendah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank umum. Tugasnya diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktik-praktik ijon dan pelepas uang (Bank Indonesia 1988 : 7).

Dengan demikian yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit terutama kepada masyarakat golongan ekonomi lemah seperti petani, pedagang dan pengusaha kecil.

Bank ini hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, koperasi atau warga negara Republik Indonesia dan

atau Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemegang saham atau anggota serta pimpinannya terdiri dari warga negara Indonesia. Usahanya dapat berbentuk perusahaan daerah, perseoran terbatas atau koperasi dengan wilayah kerja meliputi desa-desa dalam satu wilayah kecamatan tempat kedudukan bank yang bersangkutan (Keputusan Menteri Keuangan tentang pendirian Bank Perkreditan Rakyat No.1061/KMK.00/1988 pasal 2).

Lapangan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi batas-batas tugas sebagai berikut:

- a. Menerima tabungan dan deposito berjangka dengan batas waktu paling lama 3 bulan;
- b. tidak diperkenankan ikut dalam lalu lintas giro karena BPR merupakan bank yang tidak dapat menciptakan uang. Dalam hubungan ini, bank dilarang mengeluarkan kwitansi yang berfungsi sebagai cek;
- c. menerima dan memberikan kredit kepada pedagang-pedagang di pasar dan penduduk desa;
- d. tidak diperkenankan melakukan praktik penggadaian (Thomas Suyatno et al., 1989 : 26).

Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah (Pakto'27) beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam pendirian dan usaha bank, maka terdapat dua jenis Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) gaya baru dan BPR gaya lama. BPR gaya baru merupakan reformasi dari keadaan BPR sebelumnya. Model ini berkembang ketika pemerintah lewat paket kebijaksanaannya memutuskan agar BPR-BPR melakukan pembenahan-pembenahan. Dengan kata lain deregulasi sektor perbankan yang dikenal lewat Pakto'27 secara langsung mempengaruhi eksistensi BPR.

Di antara peraturan yang diputuskan adalah tentang pendirian BPR, usaha BPR serta permodalan yang dimilikinya. Di mana BPR hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya di kecamatan dan di desa-desa di luar ibukota negara, ibukota daerah tingkat I dan di luar ibukota daerah tingkat II. Ditentukan pula bahwa modal yang dimiliki sekurang-kurangnya 50 juta rupiah dan usaha yang dijalankan adalah menerima tabungan dan deposito berjangka serta memberikan kredit kepada pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan (Keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK.00/1988).

BPR gaya lama disebutkan untuk membedakannya dengan BPR yang didirikan setelah Pakto 27. Terdapatnya perbedaan kemampuan BPR untuk memenuhi ketentuan Pakto dan keberadaan BPR ternyata masih diperlukan oleh masyarakat setempat, maka pemerintah mengeluarkan revisi Pakto tanggal 25 Maret 1989 yang isinya antara lain : BPR yang belum mampu menyesuaikan diri dengan keputusan di atas, tetap dapat menjalankan usahanya pada tempat semula dengan ketentuan :

- a. Tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk giro;
- b. Tidak diperkenankan pindah tempat ke luar wilayah kecamatan tempat kedudukannya;
- c. Tidak diperkenankan membuka kantor cabang atau jenis kantor lainnya;
- d. Tidak perlu menyesuaikan modalnya dengan ketentuan modal minimum bagi BPR baru, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan untuk memenuhi kesehatannya

(Keputusan Menteri Keuangan No. 279/KMK.01/1989).

2.2.2. Sumber-Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang sementara tidak digunakan dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan bank dalam bentuk penyaluran dana yang menghasilkan, seperti pemberian kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga atau mendepositokannya pada bank lain.

Pada umumnya dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari :

- a. Dana sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham.
- b. Dana pinjaman dari pihak luar bank (dari bank lain)
- c. Dana simpanan masyarakat (pihak ketiga).

Dana sendiri biasanya terdiri dari modal disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan. Dana ini umumnya digunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor sebagai promosi untuk menarik minat masyarakat, untuk menutupi kemungkinan resiko, untuk tambahan pemberian kredit dan juga untuk memperkuat posisi "cash reserve".

Dana pinjaman dari pihak luar, terdiri dari pinjam-

an pada bank-bank lain (call money), pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan pinjaman dari bank sentral (kredit likuiditas).

Sumber dana terbesar yang dipakai oleh manajemen bank untuk memperoleh penghasilan melalui media ganda yaitu pemberian kredit dan investasi adalah simpanan masyarakat. Oleh karena itu simpanan ini merupakan tiang utama dan terpenting bagi eksistensi sebuah bank.

Jadi kebijaksanaan manajemen puncak dalam bidang pengumpulan dana masyarakat berpengaruh besar terhadap keuangan dan pertumbuhan sebuah bank. Hanya sesudah diterimanya simpanan inilah bank dapat melaksanakan fungsi-fungsinya yang lain.

Dana yang berasal dari pihak ketiga ini umumnya terdiri dari Giro (demand-deposits), deposito (time-deposits) dan tabungan (saving).

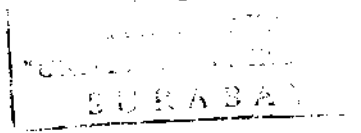
a. Giro (demand-deposits)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

(Muchdarsyah Sinungan, 1989 : 63)

Sedangkan Hill dan Sartoris (1988 : 62), mengemukakan :

Demand deposits are transaction (checking) accounts. Cash may be removed from the account and paid to a third party "on demand" by presenting a check (electronic or paper) or by requesting a wire transfer.



(Giro adalah rekening transaksi. Pengambilan dilakukan secara tunai dari rekening tersebut dan dibayarkan kepada pihak ketiga dengan menggunakan cek, secara elektronik atau dengan surat ataupun melalui pemindahan per kawat).

Sementara itu Hempel et al. (1986 : 55), mengatakan :

Demand deposits are noninterest-bearing checking account of individuals, partnership, corporations and governmental units.

(Giro adalah rekening transaksi tanpa bunga yang dimiliki oleh perorangan, perusahaan-perusahaan, partnership dan unit-unit pemerintah).

Dari pengertian di atas, ada 3 hal yang dapat dikemukakan yaitu :

- 1) Simpanan pihak ketiga. Simpanan ini dilakukan dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak nasabah dengan bank. Nasabah mempercayakan uangnya kepada bank dan bank akan mengelola uang itu menurut ketentuan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
- 2) Penarikan dapat dilakukan setiap saat. Nasabah giro dapat melakukan penyetoran atau pengambilan setiap saat selama kantor kas bank buka. Dalam hal ini selang beberapa saat suatu perjanjian giro dapat dibatalkan oleh bank maupun nasabah.
- 3) Cara penarikan. Yang paling banyak dipergunakan adalah penarikan dengan cek / bilyet giro. Namun dalam batas-batas tertentu penarikan dalam bentuk lain seperti surat perintah atau pemindah-

bukuan dapat dilakukan.

Untuk setiap simpanan giro, khususnya di Indonesia diberikan jasa giro berdasarkan perhitungan saldo terendah setiap bulan dengan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh bank bersangkutan.

b. Deposito (Time deposits)

Deposito adalah simpanan masyarakat (pihak ketiga) kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank bersangkutan. (Achmad Ruslan dan Chairudin Husni, 1990 : 1)

Menurut Haslem (1985 : 8),

Time deposits are interest-bearing account by specifying maturity or other condition of withdrawal.

(Deposito berjangka adalah rekening yang memperoleh bunga pada waktu tertentu atau dapat ditarik pada kondisi yang lain)

Sementara itu Hill dan Sartoris, mendefinisikan deposito berjangka :

The cash in account receives interest and must be held in a bank for specified time period.

(Hill dan Sartoris, 1988 : 62).

(Deposito berjangka adalah simpanan tunai yang memperoleh bunga dan harus tetap berada di bank untuk jangka waktu tertentu).

Jadi dapat disimpulkan bahwa deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank, dengan memperoleh bunga dan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu.

Dalam praktik dikenal adanya deposito berjangka dan sertifikat deposito (negotiable Certificates of

deposit).

Deposito berjangka adalah seperti dalam definisi di atas. Bila waktu yang ditentukan habis, deponan dapat menarik simpanannya atau memperpanjang dengan suatu periode waktu yang diinginkan. Jangka waktu deposito dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan : 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Tarif bunga ditentukan oleh bank bersangkutan dan biasanya sesuai dengan perkembangan pasar.

Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas unjuk atau atas pembawa, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjualbelikan atau dipindah-tangankan kepada pihak ketiga.

Untuk penerbitan sertifikat deposito hanya diperbolehkan bagi bank umum dan bank pembangunan setelah memenuhi persyaratan tertentu antara lain dari segi kesehatan dan kemampuan permodalan.

c. Tabungan (Saving)

Bank Indonesia dalam Himpunan Ketentuan Paket Kebijakan Moneter dan Perbankan menyebutkan bahwa :

Tabungan adalah simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

(Bank Indonesia, 1988 : 26).

Sementara itu Haslem (1985 : 171), mengatakan:

Saving deposits have no specified maturity and the bank records all transactions in a pass-book or a periodically provided statement of account.

(Tabungan merupakan simpanan yang tidak mempunyai batasan waktu tertentu dan bank mencatat semua transaksi-transaksinya dalam suatu buku tabungan atau secara periodik menyajikan laporan rekening).

Dalam penelitian ini definisi tabungan yang dipergunakan adalah sesuai dengan definisi yang dikemukakan Bank Indonesia.

Dewasa ini terdapat 4 (empat) jenis tabungan yaitu : Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH) dan Tabungan jenis lainnya (Thomas Suyatno et al., 1989 : 38). Tiga diantaranya (Tabanas, Taska dan ONH) biasanya dilaksanakan oleh bank bank pemerintah dan bank-bank swasta yang mendapat izin dari Bank Indonesia. Dalam Paket Kebijakan Pemerintah, Surat Edaran No. 21/5/BPPP tgl. 27 Oktober 1988, disebutkan apabila BPR berkeinginan untuk ikut menyelenggarakan Tabanas/Taska, maka bank diharuskan mengajukan permohonan terlebih dahulu ke pada Bank Indonesia.

Dengan semakin ketatnya persaingan, bank-bank berlomba-lomba mengembangkan berbagai produk yang dapat memikat nasabah dalam hal menarik dana, seperti : Tabungan Kesra, Tahapan dan sebagainya dengan imbalan jasa dan syarat-syarat yang ditentukan oleh

bank penyelenggara.

Sumber-sumber dana Bank Perkreditan Rakyat terdiri dari dana sendiri, dana pinjaman (interbank call money dan pinjaman jangka pendek), dana pihak ketiga yang terdiri dari tabungan dan deposito berjangka.

Keseluruhan dana bank sebagaimana telah digambarkan di atas, tertera dalam pos-pos pasiva. Ini berarti dana yang merupakan sumber keuangan bank juga berfungsi sebagai kewajiban bank yang harus dipenuhinya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2.2.3. Alokasi Dana-Dana Bank

Dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun bank, sudah selayaknya bank mempersiapkan strategi penyaluran dana berdasarkan rencana alokasi yang mempunyai beberapa tujuan, yaitu : mencapai tingkat keuntungan yang cukup dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Dalam memilih pengalokasian tersebut, tentunya bank di samping memperhitungkan keuntungan, juga harus memperhitungkan resiko. Masing-masing bank mempunyai sifat dana yang berbeda-beda, Deposan juga berbeda-beda tipenya, ada yang menyimpan dalam bentuk tabungan, giro agar mereka dapat menarik uangnya sewaktu-waktu, sementara yang lain ingin menunda penarikannya. Oleh karena itu manajemen harus mema-

hami benar perbedaan tersebut, sehingga tidak hanya memenuhi kewajibannya terhadap nasabah setiap saat, tetapi juga memperoleh laba yang cukup untuk perkembangan bank selanjutnya.

Alokasi dana-dana bank, pada dasarnya dibagi dalam dua bagian dari aktiva bank : aktiva yang tidak menghasilkan (non earning asset) dan aktiva yang menghasilkan (earning asset).

Penanaman dana dalam aktiva yang tidak menghasilkan terdiri dari : cadangan primer, penanaman dana dalam aktiva tetap.

a. Cadangan Primer

Cadangan primer adalah cadangan-cadangan yang dianggap sangat likuid yang sewaktu-waktu dapat langsung digunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban segera kepada pihak ketiga.

Menurut Haslem (1985 : 101), cadangan primer terdiri dari uang tunai yang ada dalam kas perusahaan dan saldo giro yang ada pada bank koresponden.

Karena cadangan ini tidak memberikan penghasilan, maka pada umumnya cadangan ini dipertahankan pada level minimum yang diharuskan oleh Undang-Undang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti yang dikatakan oleh Summers (1978) bahwa :

Effective management requires that these assets be held to meet normal operating requirements but that any excess cash be minimized.

Sebelum pemerintah mengumumkan paket kebijaksanaan bulan Oktober 1988 yang lalu, ketentuan Bank Indonesia mengenai cadangan primer (reserve requirement) adalah sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kewajiban yang dapat dibayar. (Surat Edaran Bank Indonesia No.10/12/UPPB tgl.30-12-1977).

Kemudian sebagaimana ditetapkan dalam Pakto 27 tahun 1988, besarnya reserve requirement diturunkan menjadi 2%. Likuiditas wajib minimum tersebut merupakan perbandingan antara jumlah harta-harta likuid yang dimiliki bank dalam satu masa laporan dengan jumlah dana pihak ketiga untuk satu masa laporan, pada dua masa laporan sebelumnya. (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 21/12/BPPP tgl.27 Oktober tahun 1988).

Komponen harta-harta likuid yang dimaksudkan di atas adalah uang tunai dalam kas dan saldo giro pada Bank Indonesia. Angka dari kedua pos tersebut dikutip dari saldo yang tercatat dalam pembukuan bank yang bersangkutan. Sedangkan komponen dana pihak ketiga terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan kewajiban jangka pendek lainnya (Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No.21/12/BPPP tgl.27 Oktober 1988).

b. Penanaman Dalam Aktiva Tetap

Dalam melaksanakan tugasnya, bank memerlukan kantor, peralatan, perlengkapan lain untuk dapat menjalankan usaha perbankan secara meyakinkan. Untuk keperluan pembiayaan investasi ini, harus dengan modal sendiri atau pinjaman yang jangka waktunya lebih panjang dari aktiva itu sendiri, agar tidak mengganggu likuiditas.

Sedangkan penanaman dana dalam aktiva yang menghasilkan, terdiri dari : cadangan sekunder (secondary reserve) pemberian pinjaman (kredit) dan penanaman dana jangka panjang.

a. Cadangan Sekunder

Cadangan sekunder adalah dana yang dimiliki bank dengan mana bank dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya dan juga merupakan sumber penghasilan sementara menunggu pemenuhan kebutuhan tersebut. Penempatan dana dalam cadangan ini mutlak diperlukan demi tujuan menjaga likuiditas dan sekaligus untuk memperoleh penghasilan. Menurut Yeager dan Seitz (1985 : 138),

The funds a financial institution actually uses to meet liquidity needs are called secondary reserves. These are assets that earn interest, but can be sold quickly if additional funds are needed.

(Dana-dana yang benar-benar dipergunakan oleh suatu lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas disebut cadangan sekunder. Dana-dana ini merupakan aktiva yang menghasilkan bunga, tetapi segera dapat dijual bila diperlukan tambahan dana).

Bank akan mengusahakan sedemikian rupa, agar tidak ada dana bank yang tidak produktif, karena bila terjadi, akan mengurangi keuntungan bank.

Dalam hubungan ini, Meyer (1982 : 178) mengatakan, bahwa likuiditas bank diukur dengan jumlah aktiva yang siap dipasarkan dalam jangka pendek yang disebut cadangan sekunder. Sementara itu Luckett (1980) menambahkan bahwa cadangan sekunder itu terdiri dari broker dan dealer loans serta treasury bills.

Cadangan sekunder haruslah dapat dijadikan uang tunai sebelum jatuh tempo dengan resiko pasar yang minimum. Yang termasuk dalam cadangan ini di antaranya : penempatan dana dalam bentuk wesel, efek-efek sertifikat deposito dan sertifikat bank Indonesia. Pada dasarnya cadangan sekunder paling tinggi credit ratingnya dan pendek masa lakunya. Karena masa lakunya pendek dan resikonya minimum, maka investasi jenis ini umumnya memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan efek yang berjangka waktu lebih panjang.

b. Penyaluran Kredit

Setelah mengalokasikan dana untuk cadangan primer dan cadangan sekunder serta untuk keperluan aktiva tetap, sisa dana akan disalurkan dalam bentuk kredit.

1) Pengertian Kredit

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Bila diperhatikan neraca bank, akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya kredit. Demikian pula bila diamati sisi pendapatan bank, akan ditemui bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi kredit.

Kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere", yang berarti kepercayaan. Seseorang atau badan usaha yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) pada masa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Dengan diterimanya apa yang dijanjikan (kontraprestasi) pada masa mendatang, maka kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dalam bentuk barang, uang maupun jasa. Di sini terlihat bahwa faktor waktu merupakan faktor utama yang memisahkan antara prestasi dan kontraprestasi. Menurut Lapoliwa dan R. Chandra (1990 : 42) :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam, berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah biaya yang telah ditetapkan.

Sementara Kent (lihat Thomas Suyatno, 1989 : 11) mengatakan sebagai berikut :

Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :

- a) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya, baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa akan benar-benar diterimanya kembali pada masa yang akan datang.
 - b) Waktu, suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterimanya di masa mendatang.
 - c) Resiko, suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula resikonya, karena masa yang akan datang terdapat unsur ketidakpastian.
 - d) Prestasi, yang menjadi obyek kredit biasanya berbentuk uang.
- 2) Jenis-Jenis Kredit.

Pada prinsipnya kredit adalah uang bank yang dipinjamkan kepada nasabah dan akan dikembalikan pada suatu waktu tertentu disertai bunga. Tetapi

berdasarkan berbagai keperluan usaha serta berbagai unsur ekonomi yang mempengaruhi bidang usaha para nasabah, jenis kredit menjadi beragam, yaitu berdasarkan sifat penggunaannya, keperluan jangka waktu, cara pemakaian dan berdasarkan jaminan atas kredit yang diberikan bank.

O.P.Simorangkir (1988 : 97 - 111), menyebutkan ada beberapa jenis kredit perbankan :

- a) Kredit Rekening Koran, kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan plapon tertentu. Perusahaan mengambilnya tidak sekaligus melainkan sebagian demi sebagian sesuai dengan kebutuhannya. Bunga yang dibayar hanya untuk jumlah yang betul-betul dipergunakan walaupun kredit yang diberikan lebih dari jumlah yang dipakai.
- b) Revolving Kredit, yaitu kredit berputar, dimana cara penarikannya bertahap dan peminjam juga mengembalikan secara bertahap. Sistem penarikannya sama dengan rekening koran dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara pemakaiannya berbeda. Di sini nasabah diperkenankan mendisposisi bebas akan tetapi disyaratkan misalnya pada akhir triwulan I saldo pinjaman harus nol dan awal triwulan berikutnya nasabah melakukan penarikan bebas lagi

sampai akhir triwulan berikutnya.

- c) KIK dan KMKP. Kredit investasi kecil merupakan pinjaman khusus pengusaha-pengusaha pribumi yang bermodal lemah yang penggunaannya untuk membiayai alat atau aktiva yang bersifat permanen seperti kendaraan, tanah, gedung. Sedangkan Kredit Modal Kerja Permanen merupakan suatu pinjaman yang diberikan dan dipergunakan sebagai modal lancar serta secara terus-menerus diperlukan untuk membiayai atau menutupi ongkos-ongkos, pembelian bahan-bahan, biaya tenaga kerja dan biaya lainnya.
- d) Kredit Atas Dasar Kelayakan, adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dengan penilaian kredit yang lebih ditekankan pada pertimbangan kelayakan dan dititik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan. Untuk menyimpulkan kelayakan tersebut diperhatikan aspek-aspek : manajemen, pemasaran, teknis, keuangan, yuridis dan ekonomi.
- e) Kredit Mini, kredit yang diberikan kepada golongan pengusaha kecil di pedesaan misalnya: petani, pedagang, pengrajin dan nelayan.
- f) Kredit Midi, kredit yang diberikan kepada nasabah-nasabah yang semula usahanya dibiayai dengan kredit mini, kemudian membutuhkan modal yang le-

bih besar karena perkembangan usahanya.

- g) Kredit Investasi, kredit jangka menengah/panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud di sini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada, pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.

Sedangkan Brick menyebutkan ada Commercial Lending yaitu pinjaman yang diberikan bank untuk keperluan bisnis dan Consumer & Mortgage Lending yaitu pinjaman yang diberikan kepada konsumen (Brick, 1980 : 97).

Pinjaman untuk keperluan bisnis ada yang berbentuk Term-Loans yaitu pinjaman yang batas waktunya (maturity) lebih dari setahun. Di sini nasabah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan kredit ini. Term-Loans dapat sekaligus mencakup kredit produksi, kredit-perdagangan dan kredit investasi. Untuk pinjaman jangka panjang ini bank bekerjasama dengan perusahaan asuransi. Bentuk lainnya adalah Revolving-Credit yaitu pinjaman yang diberikan dalam jangka pendek yang dibayar selama setahun.

Konsumen kredit ini dapat meminjam dan membayar secara berulang-ulang sampai batas waktu yang disepakati, selama kredit tidak melebihi jumlah semula yang disetujui (Merris, 1979).

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank komersial yang melayani para pedagang kecil dan pengusaha golongan ekonomi lemah, dalam operasinya menyalurkan kredit jangka pendek (paling lama satu tahun), baik yang disalurkan ke sektor-sektor ekonomi maupun kepada perorangan/pegawai. Jenis-jenis kredit yang telah disalurkan selama ini adalah kredit mini, kredit konsumen dan bentuk kredit kelayakan.

3) Analisis Kredit.

Perkreditan adalah bisnis pokok dari bank komersial. Akan tetapi walaupun perkreditan itu penting dan menguntungkan, tugas ini sulit dan menuntut pengawasan manajemen yang ketat.

Kredit yang diberikan sangat beragam, baik jenis pinjamannya, besar pinjaman, jangka waktu, penggunaan dananya, skedul pelunasannya maupun tingkat jaminan dan resikonya. Masing-masing kredit harus dinilai dengan teliti.

Analisis kredit yang sistematis adalah kunci suksesnya bisnis kredit. Efektifnya pelaksanaan kredit dapat mengurangi resiko kredit. Sedangkan kurangnya perhatian terhadap penilaian kredit akan menjadi

bisnis yang berbahaya. Manajer kredit harus mempunyai perangkat pedoman untuk keputusan-keputusan kreditnya dan menjamin dipatuhinya pedoman tersebut.

Menurut Hempel et al. (1986 : 359) :

The essence of all credit analysis can be captured in four basic credit factors or lines of inquiry:

- a) The borrower's character
- b) The use of loan funds
- c) The primary source of loan repayment
- d) Secondary sources of repayment.

(Pada prinsipnya keseluruhan analisis kredit dapat dirangkum dalam empat faktor pokok :

- a) sifat atau karakter dari si peminjam
- b) penggunaan dana pinjaman
- c) sumber utama untuk mengembalikan pinjaman
- d) sumber-sumber sekunder untuk mengembalikan pinjaman).

Selanjutnya juga dikatakan bahwa tujuan dilakukan analisis kredit ini adalah untuk memperoleh informasi yang cukup tentang kemauan dan kesanggupan pemohon kredit dalam memenuhi kewajibannya. Ada tiga sumber penting yaitu melalui wawancara dengan nasabah, dari sumber-sumber internal dan sumber eksternal.

Walean (1984 : 91 - 96) mengemukakan bahwa penilaian suatu permohonan kredit tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan kredit dan sebagainya. Prinsip dasar ini yang merupakan prinsip klasik dikenal dengan "Prinsip 5C", yang meliputi :

- a) Character (watak), adalah keadaan watak dan si-

- fat peminjam, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
- b) Capacity (kecakapan), kemampuan yang dimiliki peminjam untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan, termasuk kemampuan dalam usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan.
 - c) Capital (modal), adalah dana yang dimiliki peminjam untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Penilaian ini adalah untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber-sumber dana permodalan dan penggunaannya.
 - d) Collateral (jaminan) adalah barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan terhadap kredit yang diterimanya. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana resiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial kepada bank dapat tertutup oleh barang-barang jaminan tersebut.
 - e) Condition of economy (kondisi ekonomi) adalah keadaan perekonomian pada suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya perusahaan. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi perekonomian berpengaruh terhadap kegiatan usaha peminjam.

Selain "prinsip 5C" di atas, Lapoliwa dan Chandra (1990 : 43) menambahkan pula dengan prinsip 3R untuk melaksanakan kegiatan perkreditan yang sehat.

Prinsip-prinsip tersebut :

- a) Return Principle. Bank harus menilai apakah kredit itu akan menghasilkan tambahan pendapatan sehingga calon nasabah mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga bank.
- b) Repayment Capacity, kemampuan nasabah untuk membayar kembali pokok pinjaman tepat waktu.
- c) Risk Bearing, tingkat resiko yang dihadapi proyek yang dibiayai dengan kredit tersebut. Unsur-unsur resiko meliputi berbagai aspek pengadaan barang modal, bahan baku, lokasi, tenaga kerja dan lingkungan.

Dalam analisis kredit ini, hal penting yang juga harus dipertimbangkan adalah faktor Arus kas. Arus kas seringkali merupakan satu-satunya determinan riil dari resiko atau keamanan dalam perkreditan. Tugas analisis kredit di sini terutama adalah untuk mencoba menentukan probabilitas operasi perusahaan peminjam yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi utangnya sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disepakati (American Institute of Banking, 1987 : 122).

Dalam menilai suatu permohonan kredit pada kebanyakan Bank Perkreditan Rakyat di Bali, umumnya juga berpedoman pada prinsip 5C. Hal tersebut dilakukan dengan wawancara terhadap pemohon dan kemudian petugas bagian kredit juga terjun kelapangan dengan melihat kondisi lokasi yang akan dibiayai. Petugas juga mencari informasi dari aparat lingkungan mulai dari Keluhan Banjar (setingkat RW) dan Kepala Desa setempat untuk mengetahui identitas calon nasabah.

c. Penempatan Dana

Pada umumnya bank berusaha menempatkan dana pada aktiva yang berbeda-beda ciri-ciri likuiditas dan profitabilitasnya. Aktiva yang tinggi likuiditasnya seperti uang tunai dan sekuritas yang mudah dicairkan berada pada satu ujung dari spektrum aktiva. Pada ujung lainnya mungkin investasi pada obligasi yang mempunyai hasil yang lebih tinggi tetapi likuiditasnya rendah. Jadi di sini tampak ada trade-off antara penghasilan dan likuiditas.

Kebijaksanaan investasi atau dalam hal ini penempatan dana berbeda di antara bank-bank komersial karena adanya perbedaan ukuran, lokasi, kondisi dan kemampuan manajerial. Selanjutnya Hempel (1972) mengatakan :

There are four basic ingredients that should lead to sound and flexible investment policies in any bank :

- 1) Establishing general criteria and objectives for investment policies;
- 2) inventorying the investment needs of the individual bank ;
- 3) formulating flexible policies and strategies;
- 4) delegating authority while maintaining adequate control.

(Ada 4 hal pokok yang harus diperhatikan dalam menetapkan kebijaksanaan investasi yang fleksibel pada setiap bank :

- 1) Penetapan kriteria dan tujuan-tujuan umum dari kebijaksanaan investasi;
- 2) menginventarisasi keperluan investasi dari bank individu;
- 3) merumuskan strategi-strategi dan kebijaksanaan yang fleksibel;
- 4) pendelegasian wewenang sementara tetap mempertahankan kontrol yang cukup).

Dalam hubungan ini Haslem (1985 : 259), mengatakan bahwa setelah bank mengalokasikan dana untuk cadangan primer, cadangan sekunder dan portfolio kredit tertentu, sisa dana diinvestasikan untuk memperoleh pendapatan. Investasi sekuritas sebagai cadangan sekunder, tujuan utamanya adalah untuk menjaga likuiditas sedangkan tujuan sekunder memperoleh pendapatan. Sekuritas dalam investment portfolio, tujuan utamanya untuk memperoleh pendapatan, tujuan sekundernya adalah menjaga likuiditas.

Sementara itu Hoffland (1978), mengatakan bahwa portfolio investasi suatu bank merupakan bagian po-

kok dalam struktur aktivitya, karena diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan bank di samping dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Selanjutnya tujuan investasi adalah :

- 1) Untuk mengimbangi pendapatan bank, karena berkurangnya permintaan kredit dan menyediakan loanable fund bila permintaan kredit bertambah.
- 2) menyediakan kebutuhan likuiditas harian, musiman maupun perubahan-perubahan jangka panjang dari kombinasi aktiva dan pasiva.

d. Penyertaan

Menyimpang dari usaha pokok bank, Bank Indonesia dapat memberikan izin bagi bank untuk ikut serta dalam penyertaan perusahaan. Namun penyertaan ini bersifat sementara. Yang dimaksud dengan penyertaan adalah investasi dana dalam perusahaan atau bank lain sebagai modal.

Dewasa ini banyak bank melakukan penyertaan dalam perusahaan-perusahaan yang umumnya berbentuk lembaga keuangan seperti leasing company, LKBB atau perusahaan asuransi (Marzuki Usman, 1989 : 91).

Saat ini Bank Perkreditan Rakyat mengalokasikan dananya untuk cadangan primer dan cadangan sekunder dengan menempatkan dananya dalam bentuk giro pada bank lain. Sisa dana setelah dialokasikan untuk portfolio kredit tertentu

ditempatkan pada bank lain dalam bentuk deposito. Beberapa Bank Perkreditan Rakyat juga ada yang menempatkan dananya pada bank lain dalam bentuk penyertaan modal.

Untuk melihat bagaimana penghimpunan dana dan bagaimana penyalurannya/pengalokasiannya, dipakai teori "The Pool of Fund" (lihat gambar 01).

Menurut Haslem, dalam teori ini semua dana (tabungan, deposito dan sumber-sumber lain) dipusatkan (pool), kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas.

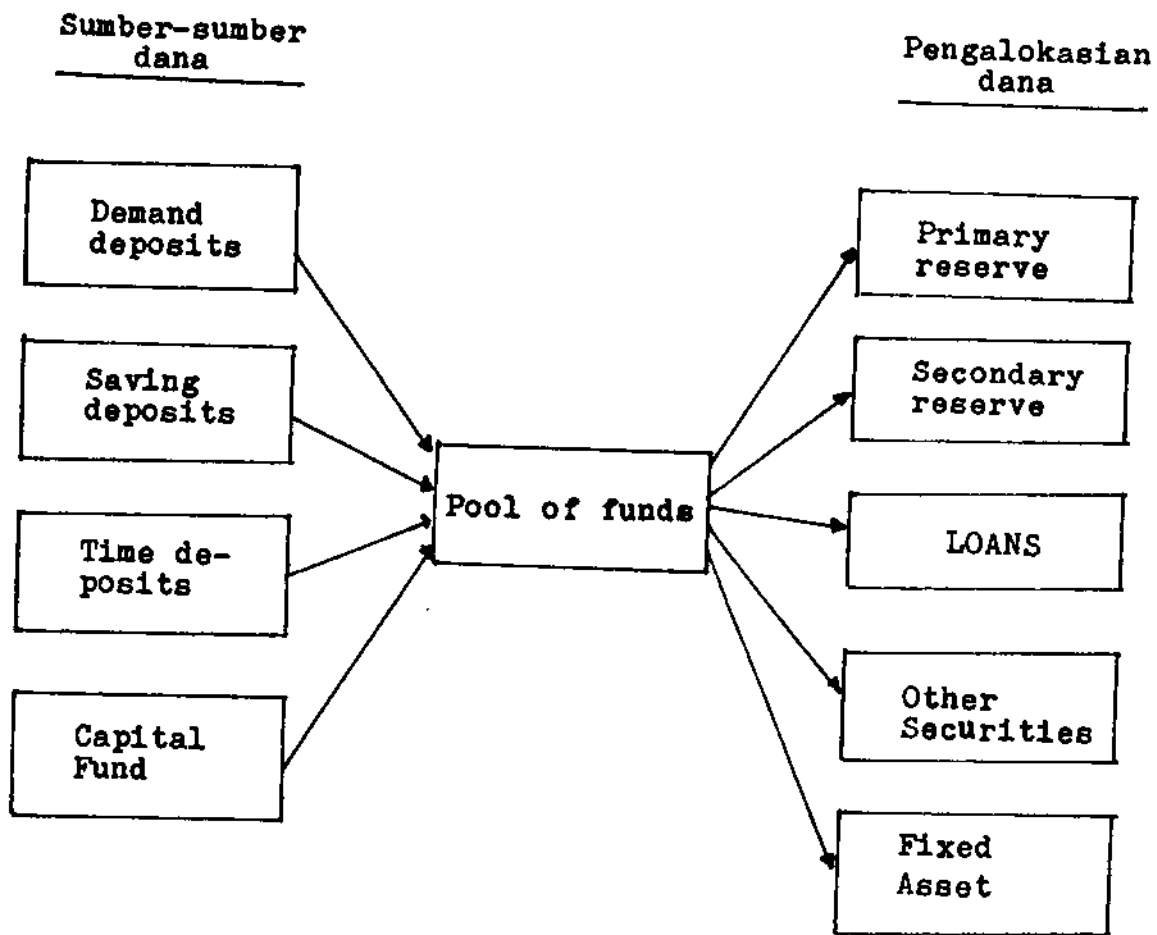
Prioritas pengalokasiannya :

- a. Cadangan likuiditas
- b. Pinjaman yang diberikan
- c. Investasi untuk memperoleh pendapatan.

Aktiva tetap biasanya di luar proses alokasi dari hari ke hari, yang biasanya dibelanjai dengan modal awal atau dari pemasukan modal berikutnya (Haslem, 1985 : 398 - 399).

2.2.4. Manajemen Portfolio Asset

Salah satu tugas utama manajer perusahaan adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber yang ada seefisien mungkin. Dalam industri perbankan, bahan-bahan yang diperoleh dari pemasok serta produk yang dijualnya adalah berupa dana. Oleh karena itu manajemen bank akan berusaha bagaimana menggunakan dana seefisien mungkin, agar dapat menjamin likuiditas dan juga profitabilitas. Dengan kata lain harus dapat mengelola asset.



Gambar 01
 Pengalokasian Dana Dengan Pendekatan
 "The Pool of Funds"
 Sumber : Marzuki Usman (1989:83).

Menurut Yeager dan Seitz (1985 : 135), ada 5 tujuan pokok yang ingin dicapai dalam manajemen asset : likuiditas, profitabilitas, resiko, fleksibilitas dan "regulatory requirement".

Likuiditas ditinjau dari sudut perbankan mencerminkan kemampuan bank untuk menyediakan dana cair dalam jumlah tertentu dan dalam periode tertentu pula. Konsep likuiditas merupakan jantung dari kegiatan lembaga perbankan. Ketidakmampuan likuiditas bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap bank selalu berusaha menjaga kemampuan ini selama mungkin demi kelangsungan hidupnya.

Satu hal penting yang membedakan struktur modal lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) dengan badan usaha lain yang non keuangan adalah rasio antara modal sendiri dengan pinjaman. Pembelanjaan usaha lembaga keuangan mengandalkan pinjaman dari nasabahnya. Makin besar dana tabungan nasabah yang dapat dimobilisasikan, semakin besar kemampuannya memberikan kredit dan melakukan investasi (Anwar Nasution, 1989).

Oleh karena sebagian besar dana yang dimiliki bank untuk kegiatan usahanya diperoleh dari pinjaman nasabah, maka kemungkinan bank menghadapi penarikan dana yang tidak terduga dari nasabah. Sehingga lembaga perbankan lebih sering menghadapi resiko likuiditas dibandingkan badan usaha lain yang non keuangan.

Menurut Burns, setiap penentuan posisi likuiditas suatu bank harus mempertimbangkan tiga elemen: jumlah, biaya dan waktu. Lebih besar jumlah dana suatu bank meningkat dalam waktu dan biaya tertentu, maka lebih likuid bank tersebut. Lebih cepat suatu bank dapat meningkatkan dana dengan biaya tertentu, likuiditasnya lebih besar (Burns, 1971). Sementara itu Brewer (1980) mengatakan bahwa likuiditas aktual suatu bank tergantung pada beberapa faktor diantaranya : struktur simpanan pihak ketiga dan relatif perputarannya, komposisi dan jatuh tempo pasiva terhadap simpanannya, musim permintaan kredit dan arus simpanan, komposisi dan maturity distribusi portfolio sekuritas, komposisi portfolio kredit dan pasar sekunder dari berbagai tipe-tipe asset.

Adapun tujuan dari pemeliharaan likuiditas adalah:

- a. memenuhi cadangan likuiditas minimum, seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- b. untuk memenuhi pencairan pinjaman dan penarikan simpanan masyarakat,
- c. memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana untuk kegiatan sehari-hari.

Seperti diketahui, sebagai perantara bank melakukan tiga kegiatan utama yaitu :

- a. mengumpulkan dana
 - b. menyalurkan dana bagi peminjam dan
 - c. menanggung resiko
- (Stigham dan Branch, 1983 : 2).

di mana dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan. Untuk itu bank harus dapat mengumpulkan dana dari pemasok dengan biaya yang rendah, sebaliknya dapat menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dengan hasil maksimal. Keuntungan yang diharapkan ini erat kaitannya dengan pengaruh kekuatan tawar menawar (*bargaining-power*) dari pihak pemasok dan pembeli (*nasabah*). Porter mengatakan bahwa kekuatan tawar menawar dari pemasok dan pembeli ini sebagai tekanan persaingan yang dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Pembeli menghendaki harga turun, mutu lebih baik. Sebaliknya pemasok menghendaki harga naik atau menurunkan mutu produk yang dibeli (Porter, 1987:22-24).

Kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba sangat berkaitan dengan *added value* yang dihasilkannya. Jika *added value* industri yang diperoleh dengan kekuatan tawar-menawar pemasok dan pembeli kecil, maka perusahaan juga mengalami kesulitan untuk memperoleh keuntungan yang memuaskan. Menurut Koch (lihat Harry Maryanto, 1989), *added value* adalah nilai satuan uang dari output yang dihasilkan minus nilai satuan uang dari input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut. Dalam bidang perbankan, *added value* dikenal dengan nama "*financial margin*" yaitu selisih (*spread*) antara tingkat bunga yang dibayar kepada pemasok dana dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peminjam dana (Ballarin, 1986 : 162).

Dalam usahanya untuk memperoleh finansial margin tidak terlepas dari resiko yang harus ditanggung. Hempel et al. (1986 : 45), menyebutkan pengukuran resiko berhubungan dengan pengukuran return, karena suatu bank akan selalu menanggung resiko untuk memperoleh return yang memadai. Ada empat katagori resiko : resiko likuiditas, resiko tingkat bunga, resiko kredit dan resiko modal.

Tidak berbeda dengan apa yang disebutkan di atas, Haslem (1984 : 21) juga mengatakan bahwa perbankan merupakan bisnis yang beresiko tinggi. Hal ini wajar karena dalam usahanya, bank melayani kebutuhan kredit dengan dana pinjaman untuk menghasilkan keuntungan. Resiko-resiko ini digolongkan ke dalam : resiko kredit, yaitu resiko di mana peminjam gagal membayar bunga maupun pokok pinjaman; resiko tingkat bunga adalah resiko di mana adanya perubahan suku bunga yang menyebabkan turunnya nilai pasar sekuritas pada saat likuiditas diperlukan; resiko karena kegagalan dan kecurian (risk of embezzlement and theft) yaitu resiko karena tindakan curang; dan resiko kesanggupan (solvency-risk) yaitu resiko kerugian asset yang mengganggu modal bank.

Dalam hubungannya dengan resiko maupun return, konsep fleksibilitas merupakan hal yang penting. Fleksibilitas dalam manajemen lembaga keuangan adalah kemampuan memperlakukan masalah-masalah yang tidak diharapkan dan peluang-peluang yang timbul dari waktu ke waktu.

Usaha pertama untuk mendiversifikasi resiko dilaku-

kan dengan teori portfolio. Teori ini muncul terutama didasarkan atas fenomena bahwa umumnya para investor dalam finansial asset menanamkan dananya tidak hanya pada satu jenis sekuritas saja, tetapi pada beberapa jenis. Penyebabnya adalah untuk mengurangi fluktuasi tingkat keuntungan yang mereka harapkan akan diperoleh dari masing-masing jenis sekuritas cenderung saling mengimbangi (Suad Husnan, 1985 : 115). Dalam hubungan dengan portfolio ini, Cohen et al. mengatakan :

A portfolio is a combination of asset that vary according to an investor's risk aversion, tax bracket, access to information and judgment.
(Cohen et al., 1987 : 15).

(Suatu portfolio adalah kombinasi dari berbagai asset sesuai dengan keengganan investor terhadap resiko, penggolongan pajak, pemerolehan informasi dan penilaian).

Demikian juga dalam usaha untuk mengurangi resiko-resiko dalam praktek perbankan, manajemen harus mendiversifikasi assetnya.

Diversifikasi adalah suatu wawasan penting dalam perencanaan program kredit dan investasi sebuah bank. Dari sudut pandangan menyeluruh, program kredit dan investasi itu harus memenuhi beberapa tujuan : menyediakan likuiditas untuk menjamin tersedianya dana pada waktu dibutuhkan, mengisi kebutuhan kredit dari perdagangan dan industri untuk jangka pendek, memenuhi kredit jangka panjang dan mendapatkan tempat investasi bagi kelebihan dana
(American Institute of Banking, 1987 : 111).

Tujuan portfolio asset adalah mengurangi sejauh mungkin resiko kerugian yang terjadi, jika dana terkonsentrasi pada beberapa debitur saja. Penyaluran ke bebe-

rapa sektor seperti perdagangan, perindustrian, pertanian dan sebagainya perlu mendapat perhatian manajemen. Sebuah bank yang sebagian besar investasi kreditnya terpusat pada perusahaan serupa jauh lebih rawan dibandingkan dengan yang mempunyai bisnis tersebar di antara banyak tipe bisnis yang berlainan. Dalam hubungan ini Broaddus mengatakan, masalah yang paling penting dan paling sulit yang dihadapi setiap manajemen bank komersial adalah manajemen portfolio asset, karena keputusan portfolio setiap saat akan berpengaruh langsung terhadap profit saat ini dan profit yang akan datang. Yang menyebabkannya adalah alternatif tindakan yang harus mempertimbangkan antara profit, likuiditas dan resiko (Broaddus, 1972). Sementara itu Djoko Prayitno (1989) juga mengatakan bahwa dengan semakin ketatnya persaingan antar bank dan lembaga keuangan bukan bank, maka setiap bank harus mengoptimalkan dana-dana yang ada pada lembaga yang bersangkutan. Hal ini disebabkan dana masyarakat yang dihimpun umumnya merupakan dana mahal deposito berjangka yang merupakan 60% dari total pasiva. Untuk itu setiap bank harus dapat mengoptimalkan dana tersebut ke dalam asset portfolio yang memberikan hasil yang baik.

Baik Broaddus maupun Djoko Prayitno mengatakan bahwa suatu pendekatan yang dapat dipakai dalam rangka ini yaitu pendekatan operation research dengan metoda Linear programming.

Linear Programming adalah prosedur dalam operation research yang dibuat untuk mengoptimumkan suatu fungsi tujuan dengan sejumlah kendala (Taha, 1982 : 7).

Dengan menerapkan metoda ini akan dapat diketahui jumlah dana yang dialokasikan pada masing-masing asset secara optimal sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal.

2.3. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, pokok permasalahan dan landasan teoritis yang telah dikemukakan, berikut di ajukan hipotesis sebagai berikut : Diduga bahwa penyaluran dana pada Bank Perkreditan Rakyat di Bali belum optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini ditempuh prosedur : identifikasi variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel dan metode analisis data.

3.1. Identifikasi Variabel

Pada bagian ini dijelaskan tentang definisi operasional dari variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi :

- a. Spread netto adalah hasil bersih yang diperoleh dari penyaluran dan penempatan dana, yang merupakan selisih antara tingkat bunga yang ditawarkan dengan cost of fund dan resiko.

Variabel-variabelnya :

- 1) Giro, merupakan penempatan dana pada bank lain dengan tujuan utama untuk menjaga likuiditas, di samping untuk memperoleh penghasilan berupa jasa giro.
- 2) Deposito, penempatan pada bank lain yang hanya dapat diambil pada suatu jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Penempatan ini dilakukan apabila ada kelebihan dana yang tidak disalurkan dalam bentuk kredit.
- 3) Kredit Sektor Perdagangan, merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada para pedagang.

- 4) Kredit Sektor Perindustrian, pinjaman yang diberikan kepada industri kecil (pengrajin).
 - 5) Kredit Sektor Pertanian, pinjaman yang diberikan bank kepada para petani (peternak, nelayan).
 - 6) Kredit Jasa/Perorangan, pinjaman yang diberikan kepada usaha jasa yang mendukung pariwisata dan kepada pegawai.
 - 7) Provisi dan Administrasi, merupakan pendapatan yang timbul karena adanya realisasi kredit.
- b. Biaya, adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menyalurkan dana. Biaya ini meliputi biaya pemasaran serta biaya umum dan administrasi.

3.2. Metode Penentuan Sampel

Pada dasarnya yang menjadi obyek penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat gaya lama yang ada di Bali, baik Bank Pasar maupun Bank Desa. Penentuan Sampel dilakukan dengan metode "Stratified Proportional Random Sampling", di mana stratanya didasarkan atas jumlah asset yang dimiliki oleh masing-masing bank yang dikelompokkan menjadi bank dengan asset sama atau di atas 5 milyar dan bank dengan asset di bawah 5 milyar.

Dari jumlah populasi Bank Perkreditan Rakyat di Bali sebanyak 46 unit, yang terdiri dari 28 unit dengan asset sama atau di atas 5 milyar dan 18 unit dengan asset di bawah 5 milyar, akan diambil sebanyak 20%, sehingga ditentukan 10 unit sebagai sampel.

Besarnya sampel minimal yang harus diambil dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N (Z\alpha)^2 \sigma^2}{d^2(N-1) + (Z\alpha)^2 \sigma^2} \quad (\text{Daniel, 1987:143}).$$

di mana :

n = jumlah sampel minimal

N = jumlah populasi

Z = Confidence level untuk = 0,05 atau nilai Z = 1,96

d = perbedaan antara rata-rata laba aktual dengan laba optimal atau maksimal 1σ

Besar sampel strata pertama (bank dengan asset 5 milyar ke atas) :

$$n = \frac{28(1,96)^2 (32,02)^2}{(32,02)^2(27) + (1,96)^2(32,02)^2}$$

$$n = 3,48 \text{ unit.}$$

=====

Besar sampel strata kedua (bank dengan asset di bawah 5 milyar) :

$$n = \frac{18(1,96)^2 (11,70)^2}{(11,70)^2(17) + (1,96)^2(11,70)^2}$$

$$n = 3,31 \text{ unit.}$$

=====

Untuk memenuhi etika penelitian dalam menjaga kerahasiaan usaha bank responden, maka identitas masing-masing Bank Perkreditan Rakyat yang dijadikan sampel akan dikemukakan secara tersamar (anonymous) dalam bentuk "BP" untuk bank pasar dan "BD" untuk bank desa.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan variabel-variabel yang telah dikemukakan di atas, untuk penelitian ini jenis dan sumber data yang diperlukan :

- a. Data Primer : data yang diperoleh langsung dari pimpinan bank dengan melakukan wawancara mengenai kebijaksanaan yang dilakukan dalam mengalokasikan dana-dana yang dapat dihimpun. Di samping itu juga melakukan wawancara dengan "Kepala Bagian Pengawasan Bank-bank" Bank Indonesia Cabang Denpasar tentang peraturan yang berlaku bagi BPR.
- b. Data Sekunder : data yang diperoleh dari bank yang bersangkutan, seperti jumlah dana yang dapat dihimpun per triwulan, jumlah dana yang disalurkan ke masing-masing sektor, jumlah dana yang ditempatkan pada giro dan deposito, tingkat bunga dan biaya-biaya. Selain dari bank responden, data sekunder juga diperoleh dari Bank Indonesia dan terbitan-terbitan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Observasi : melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap operasi bank yang diteliti.
- b. Survey : memperoleh informasi melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pimpinan bank dengan menggunakan daftar pertanyaan.

3.5. Metode Analisis Data

Pada umumnya perusahaan ingin mencapai beberapa tujuan misalnya maksimasi penjualan, minimasi biaya atau maksimasi laba. Bila suatu perusahaan mempunyai satu set tujuan seperti itu, maka tujuan tersebut tidak bisa dicapai secara bersamaan. Pendekatan yang dapat dipakai dalam hal ini adalah memaksimumkan satu kriteria, sementara yang lain adalah "satisficing" atau sebagai kendala (constraint) (Lilien and Kotler, 1983 : 55). Dalam Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan bank berskala kecil mempunyai tujuan memaksimumkan laba, sementara biaya dan penjualan adalah satisficing. Untuk mencapai tujuan tersebut bank harus dapat menyalurkan dananya secara optimal.

Untuk mengoptimasi penggunaan dana, dianalisis dengan pendekatan Linear Programming (LP). LP merupakan "problem-solving approach", di mana pendekatan ini membantu para manajer dalam proses pengambilan ke-

putusan. Dalam pendekatan ini para manajer dituntut untuk dapat memformulasikan permasalahan yang ada sebelum dilakukan perhitungan.

Dalam LP terdapat dua hal yang harus diperhatikan :

a. Fungsi Tujuan.

Fungsi tujuan ini dapat "maximize objective" atau "minimize objective". Dalam penyelesaian perhitungan optimasi LP suatu bank, fungsi tujuannya adalah maksimasi hasil yang diperoleh dari setiap investasi. Dalam BPR fungsi tujuannya adalah maksimasi hasil yang diperoleh dari penempatan dana pada giro dan deposito serta penyaluran kredit ke sektor-sektor ekonomi.

b. Kendala (constraints).

Setiap permasalahan yang ada dengan menggunakan problem-solving approach mempunyai kendala-kendala tertentu terhadap variabel yang ada. Dalam asset portfolio juga terdapat kendala-kendala baik yang diakibatkan oleh peraturan investasi itu sendiri atau yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan.

Menurut Djoko Prayitno (1989) dan Haslem (1985:404) kendala-kendala tersebut dapat diakibatkan oleh faktor ekstern maupun intern bank yang bersangkutan, dalam hal ini pada investasi itu sendiri, peraturan, kebijaksanaan bank atau resiko yang ada.

Adapun masalah LP dalam penelitian ini adalah :

$$\text{Max. } P = (s_g G + s_d D + s_{k1} K_1 + s_{k2} K_2 + \dots + s_{ki} K_i + Pr) - B$$

dengan kendala-kendala :

$$1. G + D + K_1 + K_2 + \dots + K_i \leq LF$$

2. Perbandingan antar K_i didasarkan pada kebijaksanaan masing-masing bank. Bentuk umum constraintnya :

$$pK_n + qK_m \geq 0, \text{ di mana :}$$

$$- \infty \leq p \leq \infty$$

$$- \infty \leq q \leq \infty$$

n, m merupakan bilangan bulat

$$n \neq m$$

$$3. G + D + aPr = LF$$

$$4. B = C$$

$$5. b \leq G \leq c$$

$$6. G, D, K_i \geq 0$$

$$7. s_g, s_d, s_{ki} \geq 0$$

$$8. B, Pr \geq 0$$

di mana :

s = spread atau selisih antara tingkat bunga yang diterima dengan biaya dana dan resiko yang ditanggung.

s_g = spread giro

s_d = spread deposito

s_k = spread kredit

G = Giro pada bank lain

D = Deposito pada bank lain

- K_1 = Kredit Sektor Perdagangan
 K_2 = Kredit Sektor Perindustrian
 K_3 = Kredit Sektor Pertanian
 K_4 = Kredit Sektor Jasa/Perorangan
 K_5 = Kredit Sektor Pengangkutan
 Pr = Provisi Kredit
 $B = C$ = Biaya-biaya penyaluran dana
 LF = Loanable Fund
 b = Batas minimum penempatan dalam giro (2% dari dana pihak ketiga)
 c = Batas maksimum penempatan dalam giro (15% dari dana pihak ketiga)

Untuk menyelesaikan perhitungan ini, dibantu dengan komputer/STORM Ver.1.4. Software Package.

Selanjutnya untuk menguji hipotesis, apakah kebijakan penyaluran dana pada Bank Perkreditan Rakyat di Bali sudah optimal, digunakan uji t dengan formula :

$$t \text{ hit.} = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s \sqrt{(1/n_1 + 1/n_2)}}$$

$$s = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

(Sarmanu, 1990).

di mana :

X_1 = Nilai rata-rata laba aktual

X_2 = Nilai rata-rata laba optimal

s_1 = Standar deviasi laba aktual

s_2 = Standar deviasi laba optimal

s = Standar deviasi gabungan

n_1 = periode pengamatan aktual

n_2 = periode pengamatan optimal

Kesimpulan : bermakna bila t hitung $\leq -t_{(1-\alpha)(n_1+n_2-2)}$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Keadaan Umum Bank Perkreditan Rakyat di Bali

Pada akhir tahun 1989 di daerah tingkat I Bali terdapat 141 unit kantor bank, 46 di antaranya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau 32,6% dan 40 unit kantor cabang bank umum atau 28,3% dan 3 unit kantor pusat bank umum. Di antara 46 unit BPR tersebut, 29 unit atau 63,04% berstatus Maskapai Andil Indonesia (MAI) yaitu suatu bentuk badan hukum yang hanya dapat dimiliki oleh pribumi. Di seluruh Indonesia terdapat 35 MAI BPR, jadi 82,9 % MAI BPR terdapat di Bali (Bank Indonesia, 1989).

Dari 29 unit MAI BPR tersebut, 28 atau 96,6% adalah MAI Bank Pasar (BP) dan 1 MAI Bank Desa (BD). Di samping 29 MAI BPR, terdapat 17 BPR lainnya. 13 unit berbentuk Perseroan Terbatas Bank Desa (PT BD), 1 unit Perusahaan Daerah Bank Desa (PD BD) dan 3 unit Perusahaan Daerah Bank Pasar (PD BP).

Bidang usaha BPR di Bali dalam hal pengerahan dana adalah menerima simpanan masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan. Kebanyakan BPR dalam pengumpulan dana ini menggunakan petugas luar untuk mendatangi nasabah-nasabah yang umumnya terdiri dari pedagang-pedagang kecil di pasar, industri kecil dan pegawai. Ada bank pasar

memiliki sampai 120 petugas luar yang mengumpulkan tabungan masyarakat. Kegiatan ini cenderung mendorong BPR untuk memiliki harta tetap dan investasi yang relatif tinggi. Sebagian besar BPR yang diamati memiliki dan menggunakan kendaraan kantor untuk keperluan ini.

Beberapa petugas bergerak sampai 70 km dari kantor bank. Kegiatan ini adalah melampaui "batas-batas wilayah usaha" BPR dan ini merupakan hal yang biasa. Sebagian besar BPR menyatakan bahwa kegiatan mereka melebar sampai 30 km dari kantor induk dengan mempunyai pos kerja di kabupaten di luar wilayah usahanya, dengan alasan adanya kebutuhan masyarakat yang bisa dilayani (Dahlan Thalib, 1987).

Dalam pengumpulan dana melalui deposito berjangka banyak yang melebihi jangka waktu yang ditentukan oleh bank pengawas yaitu 3 bulan, hal ini karena untuk memperoleh deposito berjangka 3 bulan relatif sulit. Sementara itu jangka waktu pinjaman yang diberikan berkisar antara 3 bulan sampai 1 tahun, dengan jumlah pinjaman minimal yang diberikan sebesar Rp. 50 ribu dan maksimal Rp. 125 juta.

Dalam penyaluran dana, umumnya BPR melayani sektor-sektor perdagangan, industri kecil pertanian, perorangan/pegawai. Rata-rata pinjaman yang disalurkan ke sektor perdagangan sejumlah 45%, ke sektor perindustrian antara 10% hingga 15%, rata-rata 15% disalurkan ke sektor jasa dan pegawai, serta 15% ke sektor pertanian.

Kelompok-kelompok ini, terutama pedagang dan pegawai meru-

pakan sumber dana tabungan bagi BPR di Bali, hal ini disebabkan karena petugas-petugas luar yang aktif mendatangi mereka.

Pada umumnya BPR Bali mengikuti perkembangan suku bunga untuk memperoleh dana dan dalam memberikan pinjaman. Bunga tabungan yang dibayar selama tahun 1989 ini berkisar antara 9% sampai 12% per tahun; bunga deposito antara 15% sampai 24% per tahun, sedangkan untuk bunga pinjaman berkisar antara 25% sampai 36% per tahun. Bunga yang ditawarkan untuk pinjaman ini rata-rata 2% hingga 5% berada di atas suku bunga yang ditawarkan bank umum. Hampir semua BPR hanya memberikan pelayanan untuk tabungan, deposito dan pinjaman, walau ada juga yang melayani pembayaran listrik, air minum dan telepon. Sedangkan jumlah karyawan yang dimiliki BPR di Bali bervariasi antara 20 orang sampai 200 orang, bergantung pada besar dan lokasi bank.

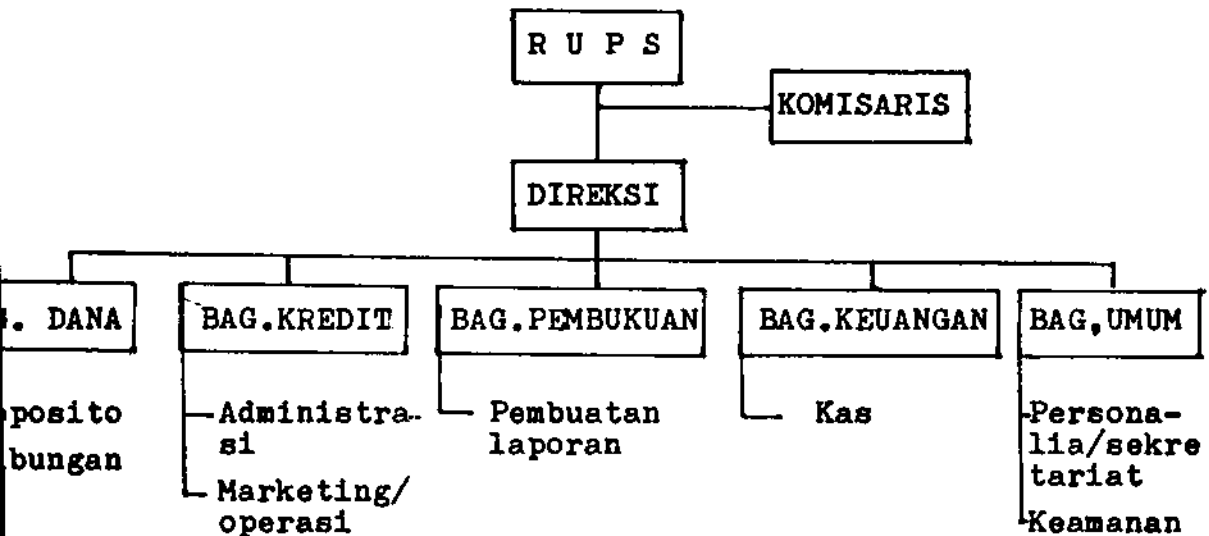
Di daerah Bali, keterkaitan atau hubungan erat dengan masyarakat juga merupakan suatu hal yang memungkinkan BPR dapat tumbuh. Banyak BPR dalam kegiatan usahanya melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dalam hubungannya dengan masyarakat yang dilayani.

4.2. Struktur Organisasi Bank Perkreditan Rakyat

Setiap bank mempunyai kebebasan untuk menyusun organisasinya sesuai dengan sasaran, tujuan dan besar-kecilnya ruang lingkup kegiatan BPR.

Karena itu organisasi bank harus bersifat fleksibel, agar mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pada saat diperlukan. Namun demikian di dalam struktur organisasi setiap bank beberapa unsur tertentu harus selalu tercermin yang menunjukkan fungsi-fungsi spesifik bank.

Rata-rata Bank Perkreditan Rakyat di Bali memiliki bagan organisasi dengan pembagian tugas-tugas, tetapi kedudukan direksi dan pendiri yang masih aktif merupakan kunci dari setiap kegiatan BPR. Struktur organisasi bank-bank perkreditan rakyat di Bali secara umum dapat dilihat dalam gambar 02.



Gambar 02
Struktur Organisasi BPR Bali

4.3. BPR Sampel Secara Singkat

Dalam sub bab ini dikemukakan secara singkat tentang keadaan masing-masing BPR yang diambil sebagai sampel.

a. Bank Pasar "A"

BP.A adalah BPR yang berstatus hukum Maskapai Andil Indonesia (MAI), berlokasi di Kabupaten Tabanan Bali. Bank ini didirikan dengan modal usaha Rp. 150 juta pada tahun 1975. Dan pada akhir tahun 1989 telah memiliki total asset sebesar Rp.8.834.868.658,27

Maksud dan tujuan didirikannya BPR ini, untuk menunjang kelancaran pembangunan perekonomian yang khususnya bergerak di bidang perbankan antara lain menerima simpanan masyarakat tetapi tidak turut dalam lalu lintas giro dan memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha kerajinan dan pedagang-pedagang kecil menurut kebutuhannya dan sesuai dengan jaminan yang diserahkan.

Untuk merangsang masyarakat agar suka menabung, bank juga memberikan hadiah-hadiah yang menarik yang diundi setiap bulan.

b. Bank Desa "B"

Bank ini berlokasi di desa Sanur kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Badung, mendapat izin operasi dari Menteri Keuangan pada tahun 1974 dengan status

hukum perseroan terbatas.

Maksud dan tujuan PT BD.B ini .. diarahkan untuk menunjang kelancaran pembangunan perekonomian terutama di pedesaan dengan jalan melakukan usaha BPR. Sedangkan kegiatan yang telah dilakukan sampai saat ini, telah menyalurkan kredit kepada masyarakat terutama masyarakat yang berusaha dibidang jasa pariwisata, pedagang, nelayan dan industri kerajinan.

Adapun modal usaha BD.B pada waktu didirikan sebesar Rp. 90.000.000,- dan pada akhir tahun 1989 telah menjadi Rp. 5.164.823.369,97.

c. Bank Desa "C"

Bank Desa C adalah BPR yang berstatus hukum perseroan terbatas dengan akte pendirian no. 61 tanggal 15 Januari 1975 yang berlokasi di desa Pedungan kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Badung.

Bank ini didirikan atas gagasan dan prakarsa masyarakat desa melalui para wakilnya yang duduk di Badan Pembina Desa dengan maksud dan tujuan : membatasi ruang gerak operasi paravrentenir, mendidik masyarakat desa untuk hidup hemat, menjadikan bank sebagai sumber pendapatan desa dan menyediakan lapangan kerja, khususnya bagi warga desa.

Kegiatan yang dilakukan bank adalah operasi kredit aktif dengan menyalurkan dana kepada masyarakat

dalam bentuk pinjaman dan menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito.

Modal usaha pertama dari bank ini sebesar Rp. 75 juta dan pada akhir tahun 1989 total aktiva yang dimiliki sebesar Rp. 5.630.938.583,12 .

d. Bank Desa "D"

Bank Desa ini berlokasi di kecamatan Denpasar Barat, kabupaten Badung. Bank didirikan tahun 1974 dengan modal usaha sebesar Rp. 180.000.000,-. Maksud dan tujuan bank yang berstatus Maskapai Andil Indonesia ini adalah mendidik masyarakat desa dalam mengelola keuangan rumah tangganya seefisien mungkin demi masa depannya, melayani masyarakat khususnya pengusaha kecil agar tidak terjerat rentenir, menyediakan lapangan kerja bagi warganya.

Kegiatan bank ini adalah menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka serta memberikan kredit ke sektor-sektor dagang, industri, pertanian dan pegawai.

Total asset yang dimiliki sampai akhir tahun 1989 sebesar Rp. 12.244.884.025,90.

e. Bank Desa "E"

Bank desa ini didirikan dengan akte notaris No. 43 tahun 1975 dan mengalami perubahan karena per-

alihan hak milik pada tahun 1989.

Bank Desa yang berbadan hukum Perseroan Terbatas ini mempunyai maksud dan tujuan melayani masyarakat di kecamatan Kuta kabupaten Badung yang berusaha di bidang perdagangan, industri kecil dan juga pegawai serta menggalakkan budaya menabung bagi warga desa dan masyarakat umumnya.

Bank yang didirikan dengan modal usaha sebesar Rp. 50 juta, sampai saat ini mempunyai total asset sebesar Rp. 1.718.226.803,79.

f. Bank Pasar "F"

Bank pasar yang didirikan pada tahun 1975 ini berlokasi di kecamatan Denpasar Barat kabupaten Badung dengan modal usaha Rp. 92 juta.

Maksud dan tujuan didirikannya bank ini adalah melayani masyarakat khususnya para pedagang di pasar para pengusaha industri kecil dan para pegawai yang membutuhkan bantuan modal, sehingga tidak meminjam kepada rentenir atau pelepas uang. Di samping itu bank juga menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito.

Bank yang berstatus hukum Maskapai Andil Indonesia ini telah mempunyai total asset pada akhir tahun 1989 sebesar Rp. 5.547.993.000,-

g. Bank Pasar "G"

Bank pasar G berstatus hukum Maskapai Andil Indonesia. Didirikan pada tahun 1973 dan berkedudukan di kabupaten Tabanan Bali. Pada tahun 1979 mengalami perubahan-perubahan tentang anggaran dasar, susunan pengurus dan komisaris. Sesuai dengan akte pada tanggal 12 Juli 1973, menyebutkan tentang maksud dan tujuan dari bank ini yaitu menjalankan usaha-usaha sebagai suatu bank pasar dengan menerima simpanan dari masyarakat umum tetapi tidak ikut dalam lalu lintas giro dan memberikan pinjaman kepada pengusaha kerajinan, toko-toko, warung, para pedagang di pasar dengan batas dan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Bank pasar yang didirikan dengan modal usaha sebesar Rp. 111.000.000,- ini, sekarang mempunyai total asset Rp. 3.696.523.710,-.

h. Bank Desa "H"

Bank Desa H merupakan bank perkreditan rakyat dengan status hukum perseroan terbatas. Bank ini semula didirikan di kecamatan Sukasana kabupaten Buleleng pada tahun 1973, kemudian pada tahun 1985 ada perubahan-perubahan dalam anggaran dasar dan pengurus, maka lokasi bank ini dipindahkan ke kecamatan Kuta kabupaten Badung. Pada tahun 1986 pindah ala-

mat menjadi di kecamatan Denpasar Barat.

Kegiatan bank tidak berbeda dengan umumnya usaha dari BPR yaitu menerima simpanan dalam bentuk deposito dan tabungan serta memberikan pinjaman kepada penduduk desa, terutama yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha industri dan petani.

Modal usaha bank ini pada saat didirikan adalah Rp. 65 juta dan total asset pada akhir tahun 1989 sebesar Rp. 2.058.259.277,59.

i. Bank Pasar "I"

Bank pasar ini berkedudukan di kecamatan Denpasar Timur kabupaten Badung yang didirikan pada tahun 1973 dengan status hukum Maskapai Andil Indonesia. Sedangkan modal usaha yang digunakan adalah Rp. 24 juta.

Kegiatan usaha dari bank ini adalah menerima tabungan dan deposito berjangka serta memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang di pasar, para petani peternak dan pegawai/perorangan.

Total asset yang dimiliki pada akhir tahun 1989 sebesar Rp. 1.703.504.507,94

j. Bank Pasar "J"

Bank pasar yang berstatus hukum Maskapai Andil Indonesia ini berlokasi di kecamatan Denpasar Ti-

mur kabupaten Badung. Bank J. didirikan pada tahun 1973 dengan modal usaha sebesar Rp. 150 juta dan pada akhir tahun 1989 telah mempunyai total asset Rp. 11.365.629.235,43.

Kegiatan dari bank ini adalah melayani pemberian kredit bagi masyarakat khususnya para pengusaha kecil, para pedagang di pasar, peternak dan pegawai/perorangan dan jasa-jasa. Dalam hal pengerahan dana bank mengeluarkan produk tabungan berhadiah dan deposito berjangka. Kegiatan lain bank juga melayani masyarakat dalam hal pembayaran listrik, air minum/PAM dan rekening telpon.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian pertama dari bab ini, akan dibahas tentang penyaluran dana yang telah dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di Bali saat ini berdasarkan sumber-sumber dana yang dapat dikumpulkan. Selanjutnya berdasarkan sumber-sumber tersebut, penyaluran dananya akan dianalisis dengan pendekatan linear programming untuk mengetahui proporsi penyaluran dana yang optimal, sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam analisis ini akan berpedoman pada manajemen portfolio asset seperti yang telah dibahas dalam tinjauan pustaka.

5.1. Kebijaksanaan Penyaluran Dana Pada BPR Bali

Seperti diketahui bahwa lembaga perbankan memiliki usaha pokok yaitu menghimpun dana dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang memerlukan untuk jangka waktu tertentu. Untuk melihat bagaimana kebijaksanaan penyaluran dana yang dilakukan oleh BPR ini, maka dianalisis perkembangannya dari tahun 1987 sampai 1989.

Secara tradisional BPR beroperasi dari dana yang bagian terbesar merupakan kewajiban pihak ketiga yaitu berupa tabungan dan deposito berjangka. Sedangkan sumber-sumber lainnya adalah dari pinjaman pada bank lain dan dari dana sendiri.

Jumlah tabungan yang dapat dikumpulkan 10 bank responden selama tiga tahun sebagian besar mengalami peningkatan (lihat lampiran 1).

Tabungan merupakan dana yang mahal biayanya dilihat dari biaya modal (cost of fund) menurut beban bank. Tetapi bila suatu bank memberikan jasa terlalu murah, maka tabungan tidak akan masuk ke bank tersebut. Di sini dikenal motif masyarakat yang ingin menunda konsumsinya dan sekaligus mengharapkan keuntungan daripadanya.

Kebanyakan Bank Perkreditan Rakyat di Bali mengeluarkan produk tabungan biasa dengan tingkat bunga yang dibayar 1% per bulan dan dihitung dari saldo terendah. Disamping membayar bunga, bank juga memberikan perangsang bagi penabung berupa hadiah-hadiah yang diundi tiap-tiap bulan. Meskipun bank tidak membayar tunai jasa tabungan tersebut kepada masing-masing penabung, akan tetapi bank tetap memikul beban biaya bunga dengan menambahkan pada pokok tabungan penabung setiap periode tertentu.

Sementara itu pengumpulan dana melalui deposito berjangka dari tahun ke tahun jumlahnya juga meningkat (lampiran 2). Deposito juga merupakan dana mahal bila dilihat dari beban biaya bank penerima deposito. Daya tarik deposito bagi calon deposan adalah bunganya yang tinggi. Semakin tinggi bunga deposito yang dijanjikan bank, maka akan semakin banyaklah deposito yang mengalir masuk ke bank. Selain bunganya yang tinggi, yang menjadikan biayanya mahal,

bank berkewajiban membayar bunganya tiap-tiap bulan.

Selain dana yang berasal dari masyarakat, beberapa bank juga memperoleh dana dari bank-bank lain, baik dari sesama BPR maupun dari bank-bank umum atau bank pembangunan. Pinjaman ini ada yang berbentuk pinjaman rekening koran dan ada pinjaman reguler dengan jangka waktu maksimum satu tahun atau "call money". Jumlah pinjaman yang diterima BPR selama 3 tahun dapat dilihat pada lampiran 3.

Pinjaman ini juga merupakan dana mahal bagi bank, karena merupakan modal asing dari sumber sekunder. Sedangkan pinjaman murah seperti kredit likuiditas Bank Indonesia selama ini belum pernah diterima BPR.

Bunga pinjaman yang diterima adalah 12% per tahun untuk pinjaman yang diterima dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sedangkan untuk pinjaman dari bank-bank umum swasta sebesar 21% per tahun.

Di samping dana pihak ketiga dan pinjaman, masih ada dana yang dapat disalurkan untuk hal-hal yang menghasilkan yaitu dana sendiri yang terdiri dari modal disetor, cadangan-an-cadangan, laba yang tidak dibagi dan lain-lain (lihat-lampiran 4).

Dari keseluruhan sumber-sumber dana tersebut, sebagian dialokasikan pada aktiva yang tidak menghasilkan seperti untuk aktiva tetap, aktiva lain-lain dan untuk cadangan primer. Secara teoritis dana bank yang dapat ditanamkan (Loanable Funds) adalah selisih antara dana setelah

dikurangi dengan reserve requirement, yaitu cadangan kas berdasarkan ketentuan cash-ratio (Lapoliwa dan R.Chandra, 1990 : 62). Dana ini selanjutnya disalurkan dalam bentuk pinjaman (kredit) atau ditempatkan pada bank lain dalam bentuk giro dan deposito berjangka.

Jumlah dana yang telah disalurkan oleh masing-masing bank responden selama 3 tahun (12 triwulan) dapat dilihat dalam lampiran 5a sampai 5j. Dan dari penyaluran tersebut, laba yang diperoleh masing-masing bank pada tahun 1987 adalah:

Tabel 5.1. : Laba Aktual Yang Diperoleh
10 BPR di Bali, tahun 1987
(dalam ribuan Rp.)

Bank \ Tw.	I	II	III	IV
BP.A	44.012,06	43.135,89	47.154,29	39.896,90
BD.B	30.278,44	37.584,52	46.442,39	44.504,82
BD.C	30.682,58	37.334,25	55.549,58	54.601,26
BD.D	155.924,17	163.800,71	182.670,86	167.160,94
BD.E	3.908,63	7.404,14	11.017,74	6.679,89
BP.E	28.061,78	25.162,93	25.824,13	30.184,33
BP.G	22.543,14	35.286,87	31.073,87	29.886,59
BD.H	21.746,25	23.039,55	27.451,99	25.889,52
BP.I	11.024,17	12.101,47	12.304,86	12.794,42
BP.J	41.176,57	44.029,34	50.493,83	46.710,87

Sumber : Hasil Penelitian.

Dari hasil analisis di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar laba yang diperoleh selama 3 triwulan mening-

kat, sedangkan pada triwulan IV terjadi sebaliknya. Pada BP.A dan BD.D penurunan pada triwulan IV disebabkan oleh penurunan jumlah dana yang dapat disalurkan karena dana yang dapat dihimpun berkurang. Sedangkan pada BD.B, BD.C BD.E, BP.G, dan BD.H penurunan laba ini disebabkan naiknya biaya dana dan biaya-biaya penyaluran dana. Dengan naiknya biaya-biaya ini menunjukkan bahwa dalam operasinya bank-bank tersebut kurang efisien.

Dari penyaluran dana yang telah dilakukan oleh 10 BPR selama tahun 1988, diperoleh laba sebagai berikut:

Tabel 5.2. : Laba Aktual Yang Diperoleh
10 BPR di Bali, tahun 1988
(dalam ribuan Rp.)

Tw. Bank	I	II	III	IV
BP.A	40.221,53	41.996,44	50.313,40	51.637,09
BD.B	45.313,78	43.630,90	47.583,21	47.806,55
BD.C	72.614,55	71.157,55	69.565,65	59.466,24
BD.D	201.811,13	229.666,19	252.912,77	282.099,75
BD.E	7.100,00	7.140,45	8.013,98	9.665,05
BP.F	48.583,01	50.023,59	65.493,86	59.708,63
BP.G	41.830,92	46.640,64	46.925,46	48.978,49
BD.H	39.588,70	35.882,91	31.370,40	21.241,98
BP.I	15.061,82	12.870,43	11.061,26	7.864,41
BP.J	55.714,52	79.020,81	88.140,56	97.341,60

Sumber : Hasil Penelitian.

Pada tahun 1988, laba yang telah diperoleh bank sebagian besar meningkat, karena jumlah dana yang dapat dihimpun semakin besar. Hanya ada 3 bank yang mengalami penurunan pada triwulan III dan IV yaitu BD.C, BD.H dan BP.I sedangkan BP.F mengalami penurunan pada triwulan IV. Penurunan laba ini sebagian besar disebabkan oleh menurunnya loanable fund. Pada BD.C disebabkan oleh penempatan dana dalam giro terlalu besar, sehingga dana yang disalurkan untuk sektor-sektor yang lebih menguntungkan berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa BD.C kurang efisien dalam penyaluran dananya.

Sementara itu pada tahun 1989, jumlah dana yang disalurkan oleh 10 BPR semakin meningkat, Dengan pembayaran tingkat bunga yang tidak berubah untuk dana yang dihimpun menyebabkan tingkat laba yang diperoleh juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.3.

Pada periode ini penurunan hanya terjadi pada BD.D yang disebabkan karena pada triwulan IV, BD.D tidak melakukan penyaluran dana dalam bentuk kredit, tetapi sebagian besar ditempatkan dalam deposito berjangka.

Pada BP.G terjadi penurunan laba, karena meningkatnya biaya dana dan juga kenaikan biaya-biaya penyaluran dana yang cukup tinggi. Penurunan pada BP.I, juga disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyaluran dana tersebut. Dalam hal ini penyaluran dana yang dilakukan kurang efisien.

**Tabel 5.3. : Laba Aktual Yang Diperoleh
10 BPR di Bali, tahun 1989
(dalam ribuan Rp.)**

Tw. Bank	I	II	III	IV
BP.A	50.116,74	61.568,72	81.283,23	173.709,50
BD.B	58.980,20	72.270,97	86.898,54	95.585,30
BD.C	54.434,63	71.838,40	88.172,48	110.506,77
BD.D	236.432,69	270.582,22	287.796,25	224.889,34
BD.E	10.456,22	16.331,39	24.018,31	26.976,44
BP.F	57.761,68	74.427,83	90.797,33	113.774,12
BP.G	41.321,62	45.397,86	54.205,26	46.089,74
BD.H	29.455,93	27.387,10	27.828,58	27.520,77
BP.I	10.405,71	13.420,93	15.847,16	13.784,85
BP.J	116.599,63	163.736,63	168.811,18	174.314,95

Sumber : Hasil Penelitian.

5.2. Optimasi Penyaluran Dana BPR Bali

Pada landasan teori sebelumnya, sudah disinggung bahwa lembaga perbankan mempunyai dua persamaan mendasar dengan badan-badan usaha lain yaitu :

- a. Lembaga perbankan berada pada posisi tengah antara pihak supplier dan customer. Bedanya komoditi yang diperdagangkan adalah berbentuk dana.
- b. Lembaga perbankan adalah profit seeker.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disusun suatu formula tertentu yang melandasi pendekatan "Linear-programming" sebagai suatu alat untuk mengoptimasi penyaluran

dana. Formulasi tersebut menyatakan bahwa, suatu lembaga perbankan harus menyalurkan dana dengan proporsi tertentu pada setiap sektor kredit maupun penempatan, sehingga dapat memaksimumkan laba dengan mendasarkan pada konsep penentuan tingkat spread yang menguntungkan ditinjau dari segi tingkat bunga yang dibebankan dan kewajiban yang harus dibayar serta tingkat resiko yang ditanggung. Dengan kata lain, bank harus mengelola portfolio aktivasnya sedemikian rupa sehingga dengan biaya dan resiko tertentu diperoleh jumlah laba yang maksimum.

Penerapan pendekatan linear-programming dalam penyaluran dana pada BPR Bali ini, dengan melakukan evaluasi terhadap pengumpulan dan penyaluran dana yang telah dilakukan selama 3 tahun dengan periode triwulan. Hal ini dilakukan karena jangka waktu pemberian kredit dan jatuh tempo deposito mempunyai jangka waktu yang bervariasi dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Sebelum melakukan perhitungan dengan metoda Linear-programming, terlebih dahulu perlu ditentukan berapa jumlah dana yang tersedia untuk disalurkan baik untuk kredit maupun untuk penempatan (loanable fund); berapa biaya dana (cost of fund); tingkat bunga yang diperoleh; resiko yang ditanggung dan spread yang diperoleh.

a. Loanable Funds.

Jumlah dana yang tersedia (loanable funds) ini me-

rupakan penjumlahan antara dana pihak ketiga (tabungan dan deposito) dengan pinjaman yang diterima dan dana sendiri, kemudian dikurangi dengan penggunaan dana untuk aktiva yang tidak menghasilkan (non earning asset) seperti untuk aktiva tetap dan aktiva lain-lain serta untuk cadangan likuiditas minimum (reserve requirement). Untuk menghitung dana ini, jumlah reserve requirement disesuaikan dengan ketentuan dalam Pakto 27, yaitu sebesar 2% dari dana pihak ketiga.

b. Biaya Dana (Cost of fund).

Biaya dana dihitung dengan menggunakan metoda "historical weighted average cost" atau metoda rata-rata tertimbang historis, yang digunakan untuk mengukur biaya dana dalam mengevaluasi pemerolehan dana dimasa lampau (Hempel et al., 1986 : 137).

Dengan metoda ini, maka biaya dana merupakan penjumlahan dari hasil kali antara biaya masing-masing dana dengan proporsinya. Dalam hal ini biaya modal sendiri diabaikan, karena proporsinya kecil. Di samping modal sendiri ini diprioritaskan untuk membiayai aktiva yang tidak menghasilkan.

c. Pendapatan Bunga dan Resiko.

Harga jual dana ditunjukkan oleh tingkat bungayang ditetapkan, baik yang dibebankan kepada peminjam

maupun yang diperoleh dari penempatan dana.

Tiap bank menentukan suku bunga yang berbeda-beda dengan bank lainnya, tergantung antara lain oleh segmen pasar yang dipilih. Suku bunga ini sering perlu ditinjau lagi kalau tingkat bunga di pasar mengalami perubahan mendasar (Sudiyono Reksoprayitno, 1989). Demikian pula dalam penentuan suku bunga kredit, bank bergantung pada sektor ekonomi yang dilayani dan tingkat resiko yang ditanggung.

Dari sepuluh bank responden, sektor industri dan pertanian merupakan sektor dengan tingkat resiko tinggi berkisar antara 2,5% sampai 3%, sedangkan sektor dengan resiko rendah adalah sektor jasa (perorangan atau pegawai tetap) yaitu antara 1% sampai 1,5%.

Sementara itu suku bunga yang dibebankan kepada peminjam berkisar antara 1,9% sampai 2,4% per bulan tetap. Suku bunga tetap dipakai karena dalam perhitungan tidak memperhatikan angsuran.

d. Spread.

Spread merupakan selisih antara pendapatan bunga dengan biaya dana dan resiko yang ditanggung. Tingkat spread akan menentukan pada sektor mana penyaluran dana diprioritaskan, sehingga laba yang diperoleh merupakan laba tertinggi.

e. **Provisi dan Administrasi.**

Merupakan pendapatan yang diterima bank, karena ada realisasi kredit. Sebagian besar BPR membebankan provisi dan administrasi sebesar 2‰ (dua permil) untuk setiap realisasi kredit. Dari 10 bank responden hanya 2 bank yang membebankan provisi dan administrasi sebesar 3‰ (tiga permil).

Menurut hasil wawancara dengan pimpinan BPR, dari jumlah pinjaman yang diberikan, rata-rata 80% berjangka waktu 1 tahun dan masing-masing 10% dengan jangka waktu 3 bulan dan 6 bulan. Hal ini diperlukan, untuk menetapkan jumlah provisi yang diperoleh bank.

f. **Biaya Penyaluran Dana.**

Biaya-biaya ini merupakan semua biaya umum, administrasi dan pemasaran yang dikeluarkan untuk keperluan penyaluran dana. Jumlah biaya ini sebesar 30% dari total biaya umum dan administrasi.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan linear programming, maka jumlah dana yang disalurkan ke masing-masing sektor dan penempatan untuk setiap bank per periode tertentu, dapat dilihat dalam lampiran 6a sampai 6j.

Sedangkan laba yang diperoleh dari penyaluran dana ini pada tahun 1987 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4 : Laba yang Diperoleh Dari Penyaluran
Dana Optimal BPR Bali, tahun 1987
(dalam ribuan Rp.)

Bank \ Tw.	I	II	III	IV
BP.A	49.355,72	49.712,18	53.680,49	43.834,00
BD.B	41.776,59	45.856,22	52.469,79	54.393,37
BD.C	41.662,85	44.419,79	60.865,03	61.175,01
BD.D	165.928,00	174.147,30	193.196,00	174.900,10
BD.E	4.132,11	8.591,46	12.505,16	8.935,31
BP.F	30.839,28	28.780,02	30.823,36	36.799,88
BP.G	28.831,85	38.956,82	33.168,38	32.251,95
BD.H	27.360,71	25.334,48	28.488,76	28.781,31
BP.I	19.557,53	19.101,81	20.100,05	21.414,44
BP.J	42.024,56	44.256,46	51.036,29	47.785,70

Sumber : Lampiran 6a - 6j

Dari hasil optimasi penyaluran dana di atas, nampak bahwa pola laba untuk triwulan I, II dan III umumnya meningkat, sedangkan pada triwulan IV mempunyai 2 pola yaitu 5 bank meningkat dan 5 lainnya menurun.

Menurunnya laba yang diperoleh oleh BP.A dan BD.D pada triwulan IV, disebabkan menurunnya jumlah dana yang dapat dihimpun berupa tabungan dan deposito, sehingga jumlah dana yang mungkin disalurkan juga menurun. Sedangkan untuk BD.E BP.G dan BP.J penurunannya disebabkan oleh tingginya cost of fund dan biaya-biaya penyaluran dana. Naiknya cost of fund karena dari jumlah dana yang dihimpun, kenaikan jum-

lah deposito lebih besar dibandingkan kenaikan jumlah tabungannya, di mana bunga yang dibayar akan menjadi lebih besar.

Jumlah laba maksimal yang diperoleh selama tahun 1988 adalah :

Tabel 5.5 : Laba Yang Diperoleh Dari Penyaluran Dana Optimal BPR Bali, tahun 1988 (dalam ribuan Rp.)

Bank	Tw.	I	II	III	IV
BP.A		43.635,98	46.409,92	55.253,92	55.989,11
BD.B		52.350,94	53.148,17	60.923,75	64.131,90
BD.C		81.757,19	78.087,37	84.915,39	93.103,57
BD.D		211.885,80	237.484,90	263.916,60	288.214,70
BD.E		8.991,26	10.420,58	17.890,96	16.480,02
BP.F		52.986,25	58.687,33	75.074,11	63.425,65
BP.G		47.873,94	50.264,82	49.750,56	50.624,23
BD.H		40.765,49	49.727,76	37.437,07	30.528,76
BP.I		16.945,10	14.909,87	15.369,38	10.495,76
BP.J		57.093,80	80.181,15	88.882,33	98.007,65

Sumber : Lampiran 6a - 6j

Pada tahun 1988, jumlah laba yang diperoleh umumnya meningkat. BD,E menurun karena peningkatan penggunaan untuk aktiva tetap yang cukup besar (pembangunan gedung baru) sehingga loanable fund menjadi kecil, walaupun jumlah dana yang dapat dihimpun meningkat. Sementara itu BP.F, BD.H dan

BP.I juga mengalami penurunan pada triwulan IV, karena penurunan jumlah dana yang dihimpun. Dengan menurunnya dana pihak ketiga akan menyebabkan biaya dana meningkat.

Jumlah laba maksimal yang diperoleh tahun 1989 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 5.6 : Laba Yang Diperoleh Dari Penyaluran Dana Optimal BPR Bali, tahun 1989 (dalam ribuan Rp.)

Tw. Bank	I	II	III	IV
BP.A	58.420,18	74.311,88	87.587,63	179.331,20
BD.B	96.253,79	113.252,30	125.967,20	120.095,30
BD.C	80.308,19	88.176,50	105.427,90	131.974,80
BD.D	258.630,50	293.517,60	320.745,20	330.280,90
BD.E	19.038,59	22.601,41	30.199,77	35.670,60
BP.F	60.950,98	77.372,03	94.993,90	121.894,00
BP.G	50.884,87	55.692,25	61.158,58	52.211,26
BD.H	32.428,04	29.748,08	32.776,11	34.025,86
BP.I	13.541,27	16.241,86	18.097,95	17.672,05
BP.J	129.146,60	183.295,80	175.953,30	192.106,30

Sumber : Lampiran 6a - 6j

Optimasi penyaluran dana pada tahun 1989 menunjukkan kecenderungan yang meningkat. BP.A pada triwulan IV, mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu 105%. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah dana deposito berjangka yang besar. Deposito ini diperoleh dari penempatan

dana yang dilakukan oleh BD.D, di mana pada triwulan IV BD.D tidak menyalurkan dananya dalam bentuk kredit, tetapi sebagian besar ditempatkan. Sementara itu BD.B, BP.G dan BP.I mengalami penurunan pada triwulan IV. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya penyaluran dana yang cukup besar, yang menunjukkan bahwa bank kurang efisien dalam penyaluran dananya. Penyebab lainnya adalah naiknya biaya dana karena dari dana yang diperoleh proporsi deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan.

5.3. Pengujian Hipotesis

Sub bab ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BPR di Bali sudah optimal selama tahun 1987 sampai 1989.

Untuk mengetahui hal tersebut, dilakukan uji beda antara laba yang telah diperoleh dari penyaluran yang telah dilakukan (laba aktual) dengan laba yang diperoleh dari penyaluran dana optimal dengan uji t. Perhitungan uji t dapat dilihat dalam lampiran 7a sampai 7j. Dengan menggunakan taraf nyata 5%, maka dapat diketahui kesimpulan dari perhitungan uji t seperti dalam tabel 5.7.

Dari 10 bank sampel, setelah dilakukan uji t ternyata enam bank berbeda tetapi tidak signifikan, sedangkan empat bank berbeda secara signifikan.

Penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BP.A selama ini menunjukkan bahwa sektor industri mendominasi pemberian

Tabel 5.7. : Hasil Perhitungan Uji t
dari 10 BPR di Bali

Bank	t hitung	t tabel	Keterangan
BP.A	- 1,345	- 1,725	tidak bermakna
BD.B	- 1,744	- 1,717	bermakna
BD.C	- 1,530	- 1,717	tidak bermakna
BD.D	- 0,625	- 1,725	tidak bermakna
BD.E	- 2,461	- 1,717	bermakna
BP.F	- 0,458	- 1,717	tidak bermakna
BP.G	- 1,453	- 1,717	tidak bermakna
BD.H	- 2,223	- 1,717	bermakna
BP.I	- 3,966	- 1,717	bermakna
BP.J	- 0,240	- 1,717	tidak bermakna

Sumber : Lampiran 7a - 7j

kreditnya, rata-rata 74,1% pada tahun 1987, 76,4% pada tahun 1988 dan pada tahun 1989 rata-rata 63,2%. Sektor Perdagangan dan sektor pertanian proporsinya tidak jauh berbeda, di mana untuk tahun 1987 kredit dagang rata-rata sebesar 5,9% sedangkan sektor pertanian 7,2% ; tahun 1988 sektor perdagangan rata-rata 6,8%, sementara sektor pertanian 7,1%. Dan tahun 1989 sektor perdagangan dan pertanian masing-masing 19,6% dan 6,02%. Sektor jasa/lain-lain proporsinya paling kecil yaitu 3,1% pada tahun 1987; 3,4% dan 2,8% untuk tahun 1988 dan 1989. Sisa dana ditempatkan dalam giro dan deposito.

Metoda penyaluran dana optimal yang juga berdasarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditetapkan manajemen bank menentukan proporsi terbesar diprioritaskan pada sektor yang mempunyai spread yang paling tinggi yaitu sektor perdagangan (62,31%), kemudian sektor industri sebesar 50% dari sektor dagang. Sementara sektor pertanian dan jasa-jasa masing-masing 10% dan 5% dari jumlah dana yang disalurkan ke sektor industri.

Dengan metoda ini, keuntungan yang diperoleh menjadi lebih tinggi. Di mana rata-rata kenaikan keuntungan tahun 1987 12,86%, tahun 1988 sebesar 9,28% dan 9,10% pada tahun 1989. Walaupun keuntungan yang diperoleh meningkat tetapi secara statistik kenaikan tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari t hitung lebih besar dari $-t$ tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya BP.A sudah menyalurkan dananya dengan cukup efisien.

BD.B selama ini menyalurkan dananya dengan proporsi yang berbeda dengan bank sebelumnya. Sektor jasa menempati urutan pertama yaitu sebesar 57,6% pada tahun 1987; 61,7% pada tahun 1988 dan 56,5% pada tahun 1989. Posisi kedua adalah sektor perdagangan dengan proporsi untuk tiga tahun masing-masing 18,9% ; 20% dan 18,1%. Sedangkan pada posisi ketiga penempatan dana pada giro (7.1% ; 12,6% dan 21,2%). Penempatan pada deposito berjangka juga cukup besar yaitu 15,3% ; 4,56% dan 7,2% masing-masing untuk tahun 1987, 1988 dan 1989.

Sektor pertanian merupakan porsi yang paling kecil, yaitu sebesar 1,02% ; 1,2% dan 1,17% untuk tiga tahun tersebut.

Dengan metoda penyaluran dana optimal, proporsi terbesar pada sektor perdagangan (63,2%), menyusul sektor jasa-jasa sebesar 31,6%, sektor pertanian 3,16% dan sisanya ditempatkan dalam giro. Penempatan dalam giro diusahakan seminimal mungkin, karena mempunyai spread yang paling kecil. Penempatan ini hanya dilakukan untuk keperluan menjaga likuiditas (dalam hal ini sebagai cadangan sekunder).

Berdasarkan kebijaksanaan ini, laba yang akan diperoleh meningkat. Pada tahun 1987 rata-rata peningkatan 22,5%, tahun 1988 dan tahun 1989 peningkatannya masing - masing sebesar 25,07% dan 45,2%. Melihat peningkatan laba yang akan diperoleh cukup tinggi dan setelah diuji secara statistik menghasilkan t hitung sebesar -1,744 yang lebih kecil dari t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BD.B ini belum optimal.

Penempatan dana yang terlalu tinggi menyebabkan laba yang diperoleh kecil, karena jasa giro lebih kecil dari biaya dana dan spread deposito lebih kecil dari spread kredit.

BD.B adalah bank yang berlokasi di daerah obyek wisata, di mana di daerah ini banyak berkembang industri-industri kerajinan dan pakaian jadi yang memerlukan bantuan modal usaha. Dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah, akan dapat mengalihkan nasabah-nasabah yang semula mencari kredit pada bank-bank umum.

Penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BD.C didominasi oleh sektor perdagangan. Pada tahun 1987 proporsi dana yang disalurkan ke sektor ini adalah 46,32%, pada tahun 1988 : 41,6% dan pada tahun 1989 sebesar 42,13%. Prioritas berikutnya adalah sektor pengangkutan masing-masing 17,48% ; 15,5% dan 15,16%. Sedangkan sektor perindustrian sektor pertanian dan sektor jasa-jasa/pegawai proporsinya hampir sama yaitu rata-rata per tahun 8,87%. Sementara penempatan dalam bentuk deposito dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu 3,34% ; 3,84% dan 15,06%. Demikian pula penempatan dalam giro semakin meningkat dari 4,83% menjadi 10,15% pada tahun 1988 dan 6,20% tahun 1989. Penempatan dana yang besar menyebabkan laba yang akan diperoleh lebih kecil, karena spread deposito maupun giro lebih kecil dari spread kredit.

Berdasarkan kebijaksanaan penyaluran dana yang optimal, proporsi penyaluran dana akan didominasi oleh sektor yang mempunyai spread yang paling tinggi yaitu sektor perindustrian (55,85%), sektor perdagangan 27,93% sektor pertanian 6,98%, sektor jasa/pegawai 5,59% dan sektor pengangkutan 1,39%. Sementara penempatan dalam giro 2,24%. Dengan kebijaksanaan ini laba yang diperoleh meningkat dibandingkan sebelumnya. Dalam tahun 1987 rata-rata peningkatan laba 16,82%, tahun 1988 sebesar 23,84% dan pada tahun 1989 sebesar 24,9%.

Walaupun laba yang diperoleh meningkat, tetapi secara statistik peningkatan tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t yang menghasilkan nilai t hitung $>$ - t tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BD.C sudah cukup efisien.

Selama ini BD.D menyalurkan dananya pada empat sektor ekonomi yaitu sektor perdagangan dengan proporsi 75,2% pada tahun 1987 ; 74,73% pada tahun 1988 ; 53,98% pada tahun 1989. Yang kedua adalah sektor perindustrian sebesar 11,93% tahun 1987 ; 11,4% pada tahun 1988 dan 8,11% tahun 1989. Sektor jasa-jasa/pegawai dengan proporsi 4,35% pada tahun 1987 ; 4,25% tahun 1988 dan 3,33% pada tahun 1989. Sektor pertanian merupakan proporsi yang paling kecil dari penyaluran dana yaitu 2,34% ; 2,43% dan 1,45% masing-masing untuk tahun 1987, 1988 dan 1989. Sementara itu penempatan dana dalam deposito berjangka dari tahun ke tahun meningkat dari 1,93% tahun 1987 menjadi 4,93% pada tahun 1988 dan pada tahun 1989 meningkat cukup tinggi 27,27%. Sedangkan sisa dana ditempatkan dalam bentuk giro yang besarnya selalu meningkat. Peningkatan penempatan dana pada tahun 1989 terutama pada triwulan IV, disebabkan karena pada saat itu BD.D memang tidak menyalurkan dananya, tetapi dana yang ada 85% ditempatkan pada deposito BP.A. Sehingga dalam uji hipotesis laba pada triwulan IV tidak diikuti.

Metoda penyaluran dana optimal, akan mengubah proporsi penyaluran dananya dengan memprioritaskan pada sektor yang mempunyai spread yang tertinggi. Sektor industri dengan proporsi 62,29% ; sektor perdagangan 31,15% ; sektor pertanian 3,11% dan sektor jasa/pegawai 1,56% sisa dana (1,895%) ditempatkan dalam giro sebagai cadangan sekunder. Dengan kebijaksanaan ini, tingkat laba yang diperoleh meningkat sejumlah 5,78% pada tahun 1987 ; 3,62% pada tahun 1988 dan 9,82% pada tahun 1989. Namun demikian peningkatan tersebut tidak cukup signifikan bila diuji statistik karena t hitung $>$ - t tabel. Jadi dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan yang telah diterapkan sudah cukup efisien.

BD.E selama ini telah menyalurkan dananya ke sektor perdagangan, perindustrian, pertanian dan sektor jasa/pegawai. Penyaluran ke sektor perdagangan selama tiga tahun ini adalah sebesar 48,83% ; 37,05% dan 45,18%. Sektor perindustrian masing-masing 24,1% ; 20,53% dan 21,91% ; sementara itu sektor pertanian 6,01% ; 5,05% dan 5,67%. Sedangkan sektor jasa/pegawai 1,92% ; 1,74% dan 4,16%. Penempatan dalam deposito cukup besar proporsinya (15,96%;17,53% dan 13,9%). Sisa dana ditempatkan dalam giro sebesar 3,26% ;15,16% dan 11,28%. Kalau dilihat dari penempatan dana, baik dalam giro maupun deposito ternyata proporsinya lebih besar dibandingkan penyaluran ke sektor kredit terutama ke sektor jasa-jasa dan pertanian yang mempunyai spread yang lebih tinggi. Dan apabila penyaluran dana dilakukan dengan proporsi

sebagai berikut : sektor industri merupakan sektor dengan proporsi terbesar (59,95%), kemudian sektor pertanian sebesar 29,97%, sektor perdagangan 6,01% dan sektor jasa/pegawai 2,9% serta penempatan dalam giro hanya sebesar 1,08% maka laba yang diperoleh akan menjadi meningkat sejumlah 17,79% pada tahun 1987 ; 87,71% pada tahun 1988 dan tahun 1989 sebesar 46,89%. Peningkatan laba yang diperoleh ini signifikan, karena dari hasil uji beda antara laba aktual dengan laba optimal menghasilkan t hitung < t tabel. Jadi dapat dikatakan bahwa penyaluran dana B.D.E belum optimal.

BP.F selama tiga tahun ini telah menyalurkan dananya ke sektor perdagangan yang merupakan sektor dengan proporsi tertinggi yaitu sebesar 66,53% ; 63,08% dan 71,28%. Sedangkan pada peringkat kedua adalah sektor jasa-jasa sejumlah 17,25% ; 16,6% dan 12,86%. Selanjutnya sektor perindustrian sebesar 4,61% ; 4,63% dan 5,32%. Penempatan dana dalam deposito berjangka selama tiga tahun berturut-turut 7,44% ; 11,52% dan 1,82%. Sisa dana ditempatkan dalam giro.

Kebijaksanaan penyaluran dana optimal, menyalurkan ke sektor industri pada proporsi terbesar (61,3%), sektor perdagangan 30,65% dan sektor jasa/pegawai 6,13%. Penempatan dalam giro sebagai cadangan sekunder sebesar 1,91 %. Dengan kebijaksanaan ini laba yang akan diperoleh lebih besar. Peningkatan tersebut sebesar 16,5% pada tahun 1987 ;

tahun 1988 sebesar 11,6% dan pada tahun 1989 sebesar 5,77%. Walaupun jumlah laba yang diperoleh meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari uji statistik yang menghasilkan t hitung $>$ - t tabel. Kesimpulannya bahwa kebijaksanaan penyaluran dana yang telah diterapkan sebelumnya sudah cukup efisien. Hal ini juga didukung oleh penempatan dana dalam deposito yang semakin berkurang karena spreadnya kecil dan penyaluran ke sektor perindustrian semakin meningkat, walaupun jumlahnya relatif kecil. Sektor jasa/pegawai yang sebagian besar merupakan pinjaman pegawai juga semakin berkurang. Sektor ini di samping spreadnya kecil juga merupakan sektor konsumtif.

Sementara itu BP.G telah menyalurkan dananya dengan jumlah terbesar juga pada sektor perdagangan yaitu sebesar 62,68% pada tahun 1987 ; 65,2% pada tahun 1988 dan 63,57% untuk tahun 1989. Sektor jasa sejumlah 19,42% ; 20,6% dan 19,92% ; sementara itu sektor pertanian penyaluran yang telah dilakukan selama tiga tahun ini adalah : 6,76% ; 4,83% dan 6,79%. Penempatan dana dalam deposito berjangka 7,5% ; 6,03% dan 4,73% dan sisanya dalam bentuk giro.

Dengan metoda penyaluran dana yang optimal, sektor perdagangan tetap pada prioritas pertama, karena selama ini belum ada permintaan dari sektor industri, namun mempunyai proporsi yang berbeda yaitu sebesar 61,26% ; prioritas kedua sektor pertanian (30,63%) dan sektor jasa/pegawai 6,13% sedangkan giro ditetapkan 1,98% sebagai cadangan sekunder.

Dengan metoda ini, laba yang diperoleh meningkat rata-rata 12,16% pada tahun 1987 ; 9,79% pada tahun 1988 dan tahun 1989 sebesar 19,19%. Walaupun jumlah laba yang diperoleh meningkat, tetapi secara statistik peningkatan tersebut tidak signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyaluran dana bank ini sudah cukup efisien.

Dalam tiga tahun terakhir ini, BD.H telah menyalurkan dana ke sektor-sektor perdagangan, perindustrian dan pertanian serta sektor jasa/lain-lain. Jumlah dana yang di salurkan ke sektor perdagangan selama tiga tahun: 62,97% 56,82% dan 58,13%. Penyaluran ke sektor industri sebesar: 23,02% ; 24,28% dan 26,11% ; sedangkan ke sektor pertanian pada tahun 1987 sebesar 1,69%; tahun 1988 sebesar 1,06% ; dan 1,16% pada tahun 1989. Penyaluran ke sektor jasa/pegawai masing-masing : 4,28% ; 3,52% dan 3,55% ; sementara itu penempatan dalam deposito semakin meningkat : 3,46%; 4,81% dan 6,43%.

Dengan metoda penyaluran yang optimal, sektor industri menempati prioritas pertama dengan tingkat spread tertinggi, proporsinya 59,60%, kemudian sektor perdagangan sebesar 29,8%, sektor pertanian 5,96% dan sektor jasa 2,98% sementara giro memperoleh alokasi 1,67%. Dengan metoda ini laba yang diperoleh meningkat. Selama tiga tahun tambahan laba yang dihasilkan adalah 12,06% pada tahun 1987; 26,67% pada tahun 1988 dan 14,95% pada tahun 1989.

Dari hasil uji t, dapat dilihat bahwa t hitung $< -t$ tabel. Dengan demikian peningkatan laba yang diperoleh adalah signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana yang telah dilakukan oleh bank ini belum optimal.

Sebagian besar dana yang dimiliki BP.I dialokasikan ke sektor perdagangan. Selama tiga tahun ini jumlahnya adalah : 60,94% ; 57,45% dan 61,08%. Prioritas berikutnya pada sektor jasa/pegawai masing-masing sebesar : 15,2%;16,2% dan 17,1% ; sementara sektor pertanian pada posisi ketiga dengan proporsi : 9,98% ; 10,89% dan 10,08%. Sisa dana ditempatkan pada deposito berjangka dan giro.

Dengan metoda penyaluran dana yang optimal, prioritas pengalokasian dana adalah : sektor perdagangan merupakan sektor dengan alokasi terbesar (61,22%) ; sektor pertanian 30,61% dan sektor jasa/pegawai 6,12% serta penempatan dalam giro 2,04% sebagai cadangan sekunder. Pengalokasian seperti ini akan menghasilkan tambahan laba. Dalam tahun 1987 tambahan laba yang dihasilkan sebesar 38,46%; tahun 1988 menghasilkan 23,22% dan pada tahun 1989 sejumlah 22,50%. Peningkatan laba yang diperoleh ini adalah signifikan, karena t hitung $< -t$ tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BPI selama ini belum optimal.

BP.J, dalam tahun 1987, 1988 dan 1989 telah menyalurkan dananya dengan proporsi sebagai berikut : sektor per

dagangan sebesar 49,47% ; 49,41% dan 44,58%. Sektor perindustrian sejumlah 35,0% ; 33,17% dan 31,14%, sementara itu sektor pertanian 3,98% ; 3,87% dan 3,59% serta sektor jasa/pegawai 10,63% ; 10,92% dan 9,79%. Penempatan dalam giro 1,62% ; 2,26% dan tahun 1989 sebesar 5,46%. Dalam tahun 1989 peningkatan dana cukup besar, tetapi belum diimbangi dengan jumlah penyalurannya, sehingga banyak dana yang ditempatkan.

Metode penyaluran dana optimal akan mengubah proporsi penyaluran menjadi : 59,41% ke sektor perindustrian 29,70% ke sektor perdagangan ; 5,95% ke sektor pertanian, serta 2,97% ke sektor jasa/pegawai. Sementara itu penempatan dalam giro 1,97% sebagai cadangan likuiditas. Dengan metode ini diperoleh peningkatan laba sebesar 1,43% pada tahun 1987; 1,20% pada tahun 1988 dan 9,55% tahun 1989. Melihat peningkatan laba yang diperoleh cukup kecil dan tidak bermakna, maka penyaluran dana yang telah dilakukan BP.J dapat dikatakan sudah optimal.

Secara umum BPR Bali sudah cukup efisien dalam penyaluran dananya. Hal ini dapat dilihat dari 10 BPR yang diambil sebagai sampel, 6 bank menunjukkan kondisi yang cukup optimal sementara 4 bank belum optimal. Di samping itu bila diuji secara keseluruhan menunjukkan bahwa perbedaan antara laba aktual dengan optimal dari BPR Bali tidak bermakna. Tetapi walaupun 6 BPR sudah dikategorikan optimal, laba yang dihasilkan belumlah maksimal, karena kalau dilihat laba yang diperoleh (laba aktual) semuanya berada di

bawah laba yang diperoleh dari penyaluran dana optimal. Adanya perbedaan tersebut, karena sebagian besar BPR tidak menyalurkan dananya ke sektor yang mempunyai spread tertinggi, seperti sektor industri tetapi lebih banyak ke sektor perdagangan. Hal ini terjadi karena BPR terutama bank-bank pasar umumnya berlokasi dekat pasar dan pemukiman pedagang-pedagang, menyebabkan sektor perdagangan mendominasi pinjaman bank.

Kebijaksanaan Pakto 27 merupakan kebijaksanaan keuangan, moneter dan perbankan untuk menderegulasi pendirian bank di Indonesia, sehingga bank dapat dijangkau oleh masyarakat. Peranan BPR dalam kebijaksanaan ini tentunya harus memenuhi keinginan pemerintah mengenai kegiatan yang harus dilakukan oleh BPR dalam sistem perbankan Indonesia. Dalam pertimbangan keputusan Presiden No. 38 tahun 1988 tentang BPR, antara lain disebutkan bahwa BPR didirikan guna memenuhi pelayanan akan jasa-jasa perbankan dan untuk menunjang kegiatan perekonomian masyarakat pada umumnya, terutama golongan pengusaha (industri) kecil dan masyarakat pedesaan. Dalam hal ini BPR diharapkan dapat berperan banyak pada sektor-sektor industri kecil seperti industri kerajinan dan pakaian jadi yang semakin berkembang yang membutuhkan modal dalam pengembangan usahanya. BPR selama ini bersifat pasif dalam pemberian kreditnya, diharapkan dapat membantu sektor-sektor industri dengan me-

ngubah portfolio kreditnya yang semula tertumpu pada sektor perdagangan. Penyebab lain dari perbedaan laba yang diperoleh adalah terletak pada penempatan dana yang cukup besar baik dalam giro maupun deposito. Dana ini seharusnya dapat disalurkan pada hal-hal yang menguntungkan yaitu pada sektor-sektor ekonomi yang memerlukan. Penempatan dalam giro diusahakan seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan untuk membantu cadangan likuiditas minimum.

BPR merupakan salah satu bentuk bank sekunder yang wilayah operasinya sangat terbatas dengan kategori nasabah yang umumnya mempunyai kemampuan dan skala usaha kecil, di samping sangat sedikit memperoleh fasilitas dari Bank Indonesia (seperti kredit likuiditas) sebagai bank pembina. Dalam kaitannya dengan perkembangan kondisi persaingan antar bank, secara teoritis sebenarnya BPR merupakan kelompok bank yang memiliki posisi persaingan dan daya saing yang lemah dibandingkan kelompok bank lain (bank-bank umum). Kelemahan ini terjadi karena adanya batasan-batasan dalam ruang gerak usahanya, di samping skala usaha yang relatif kecil dibandingkan kelompok bank-bank umum. Hal ini kurang memungkinkan untuk mendapatkan sumber daya terutama sumber daya manusia yang berkualitas baik untuk peningkatan daya saing dan sekaligus memperluas posisi persaingan dilingkungannya. Seperti yang dikatakan oleh Gatha (1987), bahwa umumnya tingkat profesionalisme dalam BPR di Bali masih rendah baik secara teoritis maupun praktek. Sedikit sekali

usaha peningkatan kemampuan dan profesionalisme karyawan, walaupun dari segi finansial sebenarnya bank relatif mampu untuk melaksanakannya. Hal ini merupakan salah satu sebab pengelolaan dananya kurang cermat. Kebanyakan BPR di Bali dikelola oleh pemiliknya yang umumnya kurang mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan. Dengan menggunakan tenaga profesional, pengelolaan dana dapat lebih efektif dan efisien. Menurut Channon (1986 :40), agar dapat mencapai tujuan strategi portfolio yang efektif diperlukan manajer dari unit-unit operasi yang mampu, untuk dilibatkan dalam pembuatan kebijaksanaan dan perubahan-perubahan variabel kunci dibawah pengawasannya.

Keberhasilan bank dalam mengembangkan usaha lebih ditentukan oleh kemampuan dalam mengembangkan fungsi pemasaran yang lebih agresif. Bank Perkreditan Rakyat yang bergerak di tengah-tengah lingkungan yang relatif sulit dibandingkan dengan bank-bank umum baik di bidang permodalan jangkauan wilayah usaha, diversifikasi produk-produk bank, efisiensi, profesionalisme dan penggunaan teknologi tinggi harus menampilkan diri secara spesifik baik dalam pengerahan dana maupun dalam penyaluran dana. Misalnya dalam bentuk "door to door service". Dengan demikian bank dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha dan perkembangan selanjutnya dimasa yang akan datang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BPR Bali selama 3 tahun sebagian besar sudah cukup efisien. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji beda antara laba yang telah diperoleh (laba aktual) dengan laba yang dihitung dengan linear programming, menunjukkan bahwa 6 bank dari 10 bank yang diteliti perbedaannya tidak bermakna dan 4 bank berbeda secara bermakna. Selanjutnya bila dari 10 bank tersebut diuji rata-rata secara keseluruhan, menunjukkan bahwa t hitung $> t$ tabel. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa diduga kebijaksanaan penyaluran dana yang telah dilakukan oleh BPR Bali belum optimal, tidak dapat diterima. Tetapi walaupun demikian, laba yang diperoleh masih berada di bawah laba dengan penyaluran dana optimal. Hal ini disebabkan karena dalam pemberian kreditnya bank kurang memperhatikan perbedaan spread netto (termasuk resiko) pada tiap-tiap sektor ekonomi. Di samping itu, rendahnya laba aktual yang diperoleh juga diakibatkan adanya penempatan dana dalam bentuk giro dan deposito yang cukup tinggi.

- b. Portfoglio kredit dari 10 BPR di Bali, kebanyakan tertumpu pada sektor perdagangan. Ini menunjukkan bahwa bank bersifat pasif dalam penyaluran kreditnya, yaitu hanya melayani nasabah yang datang ke bank, padahal sektor yang mempunyai spread lebih tinggi masih tersedia peluang, seperti sektor industri.

6.2. Saran-Saran

Untuk melengkapi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, berikut dikemukakan beberapa saran :

- a. Perlunya mengubah portfoglio kredit dan lebih memprioritaskan sektor industri, karena di samping mempunyai spread neto yang lebih tinggi, juga sektor ini semakin berkembang, khususnya industri kerajinan dan industri pakaian jadi. Untuk itu bank-bank hendaknya melatih karyawannya agar lebih memahami tentang sektor tersebut.
- b. Keberhasilan bank dalam mengembangkan kegiatan usahanya dimasa yang akan datang, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengelola usaha secara efektif dan efisien yang terkait erat dengan orientasi kebijaksanaan yang ditempuhnya. Di antaranya meningkatkan fungsi pemasaran. Dalam hubungan ini perlu kiranya disadari oleh pimpinan bank bahwa

kebijaksanaan penyaluran dana yang optimal merupakan faktor penting yang mendukung kemampulabaan usahanya.

- c. Perlunya peningkatan profesionalisme serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk pemanfaatan teknologi tepat guna serta memperluas jangkauan pelayanannya. Perkembangan situasi menuntut perbankan melakukan penyesuaian-penyesuaian, baik dalam hal sistem dan prosedur kerja maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan pendidikan karyawan pada lembaga khusus, seperti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) maupun "on the job training" di dalam bank itu sendiri. Dengan profesionalisme yang semakin meningkat dan mutu pelayanan yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap bank akan semakin meningkat.
- d. Mengingat perkembangan sektor pariwisata yang semakin pesat, maka untuk masa yang akan datang penyaluran kredit perlu juga diarahkan ke sektor industri jasa pendukung pariwisata (biro perjalanan), karena diperkirakan akan memperoleh spread netto yang lebih tinggi.
- e. Untuk penelitian yang akan datang, masih perlu dikaji mengenai manajemen bank dari segi pasiva, mengingat pada saat ini semakin gencarnya persaingan antara BPR dalam hal pengerahan dana. Dengan pengelolaan pasiva yang baik, dapat meminimumkan biaya dana.